



TRANSISI DEMOKRASI DI LIBYA PADA TAHUN 2011 – 2014

DEMOCRATIC TRANSITION IN LIBYA ON 2011 – 2014

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

AGE JUHDI ALFANI

NIM 090910101044

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Susiono dan Ibu Tinil Qoyyimah yang tidak pernah lelah memberi kasih sayang, pengorbanan sebagai orang tua yang tidak ternilai, memberikan semangat saat saya mulai bosan dan kesabaran yang tiada henti-hentinya;
2. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

Ilmu adalah pelita hati. Raihlah ilmu dengan sepenuh hati.



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Age Juhdi Alfani

NIM : 090910101044

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Transisi Demokrasi di Libya Pada Tahun 2011 – 2014” adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Februari 2016

Age Juhdi Alfani
NIM 090910101044

SKRIPSI

TRANSISI DEMOKRASI DI LIBYA PADA TAHUN 2011 – 2014

DEMOCRATIC TRANSITION IN LIBYA ON 2011 – 2014

oleh

AGE JUHDI ALFANI

NIM 090910101044

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, S.IP., M.A

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Transisi Demokrasi di Libya pada Tahun 2011 – 2014” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Kamis

tanggal: 4 Februari 2016

waktu : 09.00 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP. 195803171985031003

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum
NIP. 195904231987021001

Fuat Albayumi, S.IP., MA
NIP. 197404242005011002

Anggota I

Anggota II

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP. 196305261989022001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Transisi Demokrasi di Libya Pada Tahun 2011 – 2014: Age Juhdi Alfani, 090910101044; 2015; 91 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada era kepemimpinan Muammar Gaddafi (1969 – 2011), Libya dikenal sebagai negara dengan sistem politik otoriter. Melalui undang-undang Libya Nomor 71 tahun 1972, Gaddafi membatasi hak partisipasi politik rakyat Libya. Selama empat dekade kepemimpinan Gaddafi rakyat tidak memiliki partai politik sebagai sarana menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, sehingga komunikasi antara rakyat dan pemerintah menjadi buntu. Rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan Gaddafi dan menginginkan rezim politik demokratis melakukan pemberontakan melawan pemerintah. Pemberontakan dimulai sejak bulan Februari 2011 berujung pada terbunuhnya Gaddafi pada tanggal 20 Oktober 2011. Terbunuhnya Gaddafi menandakan bahwa rezim politik otoriter telah berakhir.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses tahapan-tahapan transisi demokrasi di Libya setelah berakhirnya rezim otoritarian Gaddafi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi demokratisasi di Libya terjadi melalui dua jalur yaitu *replacement* dan intervensi. Hasil yang dapat dicapai dalam tahapan-tahapan transisi demokrasi yaitu Libya telah berhasil melakukan tahapan transisi, ditandai dengan peralihan pemerintahan dan liberalisasi, ditandai dengan dibukanya kebebasan pers dan diselenggarakannya pemilu pada tahun 2012 dan 2014, serta instalasi, ditandai dengan pengesahan UU. No. 29 tahun 2012 tentang kebebasan politik rakyat. Konsolidasi demokrasi Libya belum tercapai, hal tersebut ditandai dengan kegagalan rekonsiliasi keamanan dan politik Libya sampai pada tahun 2014.

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan nikmat, rahmat, berkah dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Transisi Demokrasi di Libya Pada Tahun 2011-2014*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Fuat Albayumi, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah mencurahkan pikiran dan waktu dalam penulisan skripsi ini;
2. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah mengajarkan pengetahuannya selama penulis belajar di Jurusan ini;
3. Seluruh Staf dan pegawai di lingkungan kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu urusan administrasi penulis selama menempuh pendidikan;
4. Teman-teman HI 2009 yang telah berbagi kebersamaan;
5. Seluruh pihak yang telah menjadi inspirasi dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih banyak atas dukungannya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 4 Februari 2016
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.2.1 Batasan Materi	9
1.2.2 Batasan Waktu	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Argumen Utama	14
1.7 Metode Penelitian	14
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	15
1.7.2 Teknik Analisis Data	15
1.8 Sistematika Penulisan	16
BAB 2. KONDISI POLITIK DI LIBYA PADA ERA KEPEMIMPINAN	
MUAMMAR GADDAFI	17
2.1 Sistem Politik dan Pemerintahan Libya	21
2.2 Lembaga – Lembaga Politik Pemerintahan di Libya	25

2.2.1 Lembaga Kepresidenan	25
2.2.2 Lembaga Perwakilan Rakyat	26
2.3 Mekanisme Pembuatan Kebijakan Politik di Libya	27
2.4 Politik Luar Negeri Libya pada Era Kepemimpinan	
Muammar Gaddafi	29
2.5 Represi Rezim Muammar Gaddafi Terhadap Partisipasi	
Politik Rakyat Libya	33
2.6 Despotisme Kepemimpinan Muammar Gaddafi	35
BAB 3. UPAYA NATIONAL TRANSITIONAL COUNCIL (NTC)	
DAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION	
(NATO) DALAM PENGGULINGAN KEPEMIMPINAN	
MUAMMAR GADDAFI	40
3.1 Perlawanan Rakyat Libya Terhadap Rezim Otoritarian	
Muammar Gaddafi	40
3.2 Peran <i>National Transitional Council</i> (NTC)	
Dalam Penggulingan Rezim Muammar Gaddafi	44
3.2.1 Terbentuknya <i>National Transitional Council</i> (NTC)	44
3.2.2 Pembebasan Libya dari Kekuasaan Muammar Gaddafi ..	46
3.3 Intervensi <i>North Atlantic Treaty Organization</i> (NATO)	
di Libya	50
3.3.1 Legalitas Intervensi NATO di Libya	50
3.3.2 Operasi <i>Unified Protector</i> oleh NATO di Libya	52
BAB 4. TRANSISI POLITIK LIBYA MENUJU DEMOKRASI PASCA	
JATUHNYA MUAMMAR GADDAFI	56
4.1 Libya Dibawah Pemerintahan Transisi	57
4.2 Liberalisasi Politik	60
4.2.1 Pemilu Parlemen Libya 7 juli 2012	63
4.2.2 Pemilu Parlemen Libya 25 Juni 2014	68
4.3 Proses Instalasi Politik Demokrasi	72
4.4 Kegagalan Rekonsiliasi Nasional Libya	
4.4.1 Rekonsiliasi Keamanan di Libya	73

4.4.2	Rekonsiliasi Politik di Libya Pasca Jatuhnya Muammar Gaddafi	76
BAB 5. KESIMPULAN	81
DAFTAR PUSTAKA	82



DAFTAR SINGKATAN

ASU (*Arab Socialist Union*)

BPC (*Basic People Conferences*)

GPC (*General People's Congress*)

GULS (*General Union of Libyan Students*)

GNC (*General Congress National*)

HNEC (*High National Elections Commission*)

JCP (*Justice and Construction Party*)

NATO (*North Atlantic Treaty Organization*)

NFA (*National Force Alliance*)

NTC (*National Transitional Council*)

LLO (*Libyan Liberation Organization*)

LNSF (*Libyan National Salvation Front*)

UNSMIL (*United Nation Support Mission In Libya*)

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Kabinet Abdel Rahim el-Keib 58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Negara Libya	17
Gambar 2. Peta Persebaran Suku di Libya	19



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Timur Tengah merupakan wilayah dimana bentuk pemerintahan otoriter masih banyak diberlakukan. Negara-negara seperti Tunisia, Mesir dan Libya adalah negara yang identik sebagai negara otoriter. Ketiga negara tersebut menekan kebebasan partisipasi politik dengan cara meminimalisir adanya partai politik dan bahkan di Libya partai politik dilarang keberadaannya. Sehingga penekanan partisipasi massa di negara-negara otoriter menyebabkan kontrol terhadap pemerintah oleh rakyat menjadi sangat sulit dilakukan. Kekuasaan para pemimpin negara di beberapa negara Timur Tengah yang tidak terkontrol memiliki peluang besar bagi pemimpin negara tersebut untuk bertindak korup dan nepotisme.

Kondisi politik beberapa negara otoriter di Timur Tengah menyebabkan munculnya gerakan-gerakan demokratisasi oleh rakyat yang menuntut para pemimpin otoriter turun dari jabatannya. Gerakan demokratisasi bergulir dengan cepat di beberapa negara Timur Tengah. Pada tanggal 17 Desember 2010 demokratisasi di Tunisia berujung pada lengsernya Ben Ali. Sebagai pemimpin negara Tunisia, Ben Ali dikenal sebagai pemimpin otoriter yang telah berkuasa selama 24 tahun.¹ Selanjutnya demokratisasi bergulir menghampiri Mesir dimana perlawanan rakyat Mesir terhadap rezim Husni Mubarak berhasil menumbangkan rezim Mubarak. Husni Mubarak telah berkuasa di Mesir selama kurang lebih 32 tahun.² Setelah Mesir, gerakan demokratisasi berlanjut melanda negara Libya. Rakyat Libya menuntut mundurnya Muammar Gaddafi. Gaddafi menjadi pemimpin negara Libya selama 41 tahun.³

Demokratisasi yang terjadi di Libya merupakan revolusi politik dimana rakyat Libya menuntut pemimpin Libya, Muammar Gaddafi meletakkan jabatannya. Selain itu, demokratisasi di Libya merupakan efek bola salju dimana

¹ Nurani Soyomukti dan Muhammad Iqbal. 2011. *Ben Ali, Mubarak, Khadafi Pergolakan Politik Jazirah Arab Abad 21*. Medium. Bandung. Hlm 15

² *Ibid.* Hlm. 85

³ *Ibid.* Hlm. 146

demokratisasi yang sukses di Tunisia dan Mesir menjadi pendorong terjadinya demokratisasi di Libya. Tuntutan rakyat Libya supaya Gaddafi turun dari jabatan sebagai pemimpin Libya merupakan cermin atas ketidakpuasan rakyat Libya terhadap gaya kepemimpinan Gaddafi yang otoriter selama empat dekade. Pada sisi yang lain, selama empat dekade Gaddafi memimpin Libya, Gaddafi juga diduga telah memperkaya diri dan melakukan nepotisme dalam proses perekrutan pejabat tinggi negara Libya.

Prilaku korup dan nepotisme yang dilakukan oleh Gaddafi dapat dilihat dari gaya hidup Gaddafi dan keluarganya yang mewah. Kemewahan tersebut diperoleh Gaddafi dan keluarganya dengan menggrogoti devisa negara yang sebageian besar diperoleh dari sektor migas. Harta kekayaan keluarga Gaddafi berupa uang milyaran dollar disimpan dalam rekening gelap di Dubai.⁴ Sedangkan untuk mengisi jabatan tinggi negara, Gaddafi merekrut langsung orang-orang yang loyal kepada Gaddafi. Seperti penunjukan Farhat Kaddara sebagai Direktur Bank Sentral Libya. Farhat Kaddara adalah loyalis Gaddafi yang berasal dari suku Gaddadfa. Suku Gaddadfa merupakan suku dimana Gaddafi berasal.⁵ Penunjukan langsung Farhat Kaddara dilakukan tanpa melalui proses uji kelayakan di parlemen Libya. Tindakan Gaddafi dalam merekrut pejabat tinggi negara Libya merupakan tindakan nepotisme. Pejabat tinggi negara Libya hanya diisi oleh orang-orang yang loyal terhadap Gaddafi.

Sejak Muammar Gaddafi menggantikan Raja Idris pada tahun 1969 di puncak kekuasaan, sebagai pemimpin Libya Gaddafi juga mengganti sistem pemerintahan di Libya dari sistem Monarki menjadi sistem Jamahiriya. Sistem Jamahiriya yang dibentuk Gaddafi memiliki arti Negara Rakyat atau Negara Massa yang dalam teori adalah sebuah negara yang dikendalikan oleh dewan-dewan rakyat lokal.⁶ Namun dalam prakteknya sistem tersebut merupakan bentuk pemerintahan totaliter. Kekuasaan Gaddafi mendominasi pemerintahan di Libya selama 42 tahun.

⁴ Hendra Pasuhuk. 2011. *Di Mana Kekayaan Gaddafi Tersimpan?* Diakses melalui <http://www.dw.de/di-mana-kekayaan-gaddafi-tersimpan/a-14874929> [6 September 2014]

⁵ *Ibid.*

⁶ Nurani Soyomukti dan Muhammad Iqbal. 2011. *Op. Cit.* Hlm 150

Keberhasilan Gaddafi mendominasi kekuasaan di pemerintahan Libya, dimanfaatkan oleh Gaddafi sebagai alat untuk mempermudah dirinya dalam membuat kebijakan sesuai dengan kehendaknya. Seperti dikeluarkannya kebijakan pada pembatasan kebebasan rakyat Libya untuk berpartisipasi dalam politik. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang Libya No. 71 tahun 1972, disebutkan bahwa pendirian partai politik dan organisasi massa merupakan tindakan kriminal dan merupakan bentuk kegiatan yang membahayakan negara.⁷ Selain keberadaan partai politik dan kelompok kepentingan yang dilarang karena dianggap membahayakan negara, undang-undang Libya No.71 tahun 1972 juga berarti melarang adanya bentuk penyampaian aspirasi atau protes terhadap pemerintah Libya. Aksi protes terhadap pemerintah Libya melalui gerakan massa dianggap sebagai kegiatan membahayakan negara.

Undang-undang Libya No. 71 tahun 1972 juga dijadikan dasar oleh pemerintah Libya di bawah kepemimpinan Gaddafi untuk menindak individu-individu dan kelompok-kelompok kepentingan yang melakukan aksi protes terhadap pemerintah Libya. Melalui peraturan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan melakukan kekerasan dan penangkapan terhadap para demonstran di Libya. Pada tahun 2002 diperkirakan 86 orang dari penggiat profesional serta mahasiswa ditangkap dan dimasukkan kedalam penjara karena mereka terlibat dalam kegiatan organisasi politik Islam di Libya.⁸ Menurut catatan *Amnesty Internasional*, Libya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia seperti dilakukannya penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, eksekusi di luar atau tanpa proses hukum serta kematian tahanan di dalam penjara akibat penyiksaan dan kekerasan lainnya.⁹ Keberadaan organisasi massa (kelompok kepentingan) di Libya dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap undang-undang Libya No.71 tahun 1972. Maka

⁷ Country data.com. 2010. *Libya: Opposition to Qadhafi*. Diakses melalui <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-8216.html> [6 September 2014]

⁸ Alberta Calgary. 2011. *Foundation for Democratic Advancement Global Electoral Fairness Audit Report* . Diakses melalui <http://www.slideshare.net/FDAAdvancement/libya2011-fda-electoral-fairness-audit> [6 September 2014]

⁹ Amnesty Internasional. 2010. *Libya: Submission to the UN Universal Periodic Review: Ninth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council*. Diakses melalui <http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE19/005/2010/en> [20 September 2014]

pemerintah Libya pada era Gaddafi secara sah melakukan tindakan penangkapan atau pun kekerasan kepada individu dan kelompok kepentingan yang melanggar undang-undang tersebut.

Kepemimpinan Gaddafi di Libya juga memiliki dampak pada kondisi ekonomi rakyat Libya. Separuh dari penduduk Libya yang berjumlah 6,5 juta jiwa, merasakan semakin sempitnya peluang kerja. Pada umumnya mereka adalah pemuda yang berusia 20 tahun. Usia produktif untuk bekerja. Akan tetapi karena lapangan pekerjaan di Libya semakin sempit maka jumlah pengangguran di Libya menjadi bertambah.¹⁰ Sempitnya lapangan pekerjaan di Libya dikarenakan jumlah warga asing yang bekerja di Libya semakin bertambah, sehingga sekitar 50 persen rakyat Libya sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Kondisi Libya, dimana kepemimpinan Gaddafi yang buruk, kebebasan rakyat yang terkekang dan banyaknya pengangguran di Libya menyebabkan terjadinya gejolak politik di Libya. Rakyat Libya yang merasa kecewa kepada pemerintahan Gaddafi, melampiaskan rasa kekecewaannya dengan melakukan aksi demonstrasi menuntut agar Gaddafi segera turun dari jabatannya. Selain itu, kemunculan gerakan demonstrasi diperkuat oleh momentum revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Demonstrasi di Libya meletup hanya beberapa hari setelah kemenangan revolusi rakyat di Mesir yang berhasil menumbangkan rezim Husni Mubarak pada tanggal 11 Februari 2011.

Aksi gerakan massa yang terjadi di Libya berawal pada tanggal 15 Februari 2011. Pada saat itu warga kota Benghazi, Libya, sedang memperingati acara tahunan. Dalam rangka mengenang peristiwa pembantaian warga Libya oleh penjajah Italia yang ke-60, warga Libya berkumpul di pusat kota Benghazi. Selain itu, diperingati pula peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Gaddafi terhadap 1200 tahanan politik di penjara Abu Salim. Pembantaian yang telah dilakukan oleh pasukan Gaddafi terhadap para tahanan adalah sebagai hukuman

¹⁰ Tim Redaksi. 2011. *Libya Tanpa Ekspatriat Lumpuh*. Diakses melalui <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/02/27/libya-tanpa-ekspatriat-lumpuh/> [29 Desember 2014]

atas aksi protes yang telah dilakukan para tahanan pada tahun 1996 di Benghazi.¹¹ Aksi demonstrasi oleh warga Libya di kota Benghazi berubah menjadi kerusuhan ketika aparat keamanan kota Benghazi, merespon aksi gerakan massa menggunakan kekerasan. Tindakan aparat keamanan kota Benghazi mendapat perlawanan dari para demonstran. Demonstrasi yang melibatkan 300 hingga 400 orang di kota Benghazi berbalik menyerang markas polisi dan merusak bangunan-bangunan umum kota Benghazi.¹² Kerusuhan yang terjadi pada pertengahan bulan Februari 2011 mengakibatkan banyak korban yang terluka. Pada saat yang bersamaan seorang aktivis HAM bernama Fathi Terbil ditangkap oleh aparat keamanan kota Benghazi, Libya.¹³

Sejak penangkapan Fathi Terbil oleh aparat keamanan di kota Benghazi, Libya, aksi demonstrasi menjalar di beberapa kota besar Libya. Selain di kota Benghazi ratusan orang berdemonstrasi di Al Baida dan Zintan dengan membakar kantor polisi dan gedung-gedung keamanan. Penangkapan Fathil Terbil seorang aktivis HAM oleh aparat keamanan, menjadi pembakar semangat rakyat Libya untuk melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota di Libya. Dalam beberapa kurun waktu gelombang demonstrasi tersebut semakin besar dan menyebar hampir diseluruh kota Libya seperti Tripoli, Tajoura, Zawiyah, Zintan, Ajdabiyah, Al Bayda dan Misrata.¹⁴ Aksi demonstrasi tersebut dalam perkembangannya mengalami peningkatan dari sebuah aksi massa menjadi konflik antara demonstran dengan pemerintah Libya.

Aksi demonstrasi oleh pemberontak Libya, dianggap sebagai suatu bentuk tindakan membahayakan negara. Oleh karena itu pemerintah Gaddafi menanggapi aksi gerakan massa tersebut dengan kekerasan. Pemerintah Libya di

¹¹ Yuldi Adiwiyata. 2011. *Libya Membara*. Diakses melalui <http://www.forumkeadilan.com/focus.php?tid=93> [28 September 2014]

¹² *International Center for the Study and Research into Terrorism and assistance to the victims of Terrorism*. 2011. *Libya: An Uncertain Future – Report on a Fact Finding Mission to Assess Both Sides of the Libyan Conflict*. Diakses melalui <http://www.iran-bulletin.org/Middle%20east%20society/LibyaReport201105.pdf> [27 September 2014]

¹³ Matthias V. Hellfeld. 2011. *Libya: Chronology of a revolt against a dictator*. Diakses melalui <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15335165,00.html> [28 September 2014]

¹⁴ BBC. 2011. *Ratusan Orang Demonstran Anti Pemerintah Bentrok dengan Polisi dan Pendukung Pemerintah di Kota Benghazi Libya*. Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110217_libya.shtml [11 Agustus 2014]

bawah komando Gaddafi, mengerahkan pasukan militer dengan jet-jet tempur yang terus melancarkan serangan ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemberontak Libya. Tindakan pemerintahan Gaddafi yang represif dalam merespon aksi gerakan massa mendapat perlawanan keras dari sebagian besar rakyat Libya. Tindakan represif oleh pemerintahan Gaddafi juga mendapat kecaman dari negara luar seperti Amerika, Inggris dan Prancis. Pemerintahan Gaddafi dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Akibat dari perang yang berlatarkan tuntutan demokrasi di Libya telah mengakibatkan banyak korban, yang tewas dan terluka.¹⁵

Legitimasi yang diberikan rakyat Libya terhadap pemerintahan Gaddafi semakin menurun. Kondisi politik dalam negeri Libya menjadi tidak stabil. Menanggapi hal tersebut kelompok oposisi mengadakan pertemuan di kota Bayda, Libya pada tanggal 24 Februari 2011. Pertemuan yang diadakan oleh kelompok oposisi bertujuan mencari jalan keluar dari krisis politik di Libya. Pertemuan di kota Bayda tersebut dipimpin oleh Mustafa Abdel Jalil seorang mantan menteri kehakiman Libya pada era Gaddafi. Sebanyak 31 perwakilan dari kota-kota besar Libya hadir dalam pertemuan yang di selenggarakan di kota Bayda, Libya.¹⁶ Pertemuan berikutnya dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2011 di kota Benghazi, Libya. Pada momentum ini pihak oposisi membentuk *National Transitional Council* (NTC). Tujuan dibentuknya NTC oleh pihak oposisi adalah untuk mengkoordinir pemberontakan yang terjadi di berbagai kota Libya.¹⁷ Melalui kesepakatan para delegasi dari kota-kota besar Libya yang hadir dalam pertemuan di Benghazi, Mustafa Abdel Jalil dipilih menjadi ketua NTC.¹⁸

Dibawah pimpinan Mustafa Abdel Jalil, Dewan Transisi Nasional (NTC) mengkoordinir proses penjatuhan rezim Gaddafi dengan melakukan aksi pemberontakan di sebagian besar kota-kota Libya. Melihat semangat demokrasi

¹⁵ BBC 2011. Libya: *Pro-Gaddafi forces attack rebel-held Ras Lanuf*. Diakses melalui <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12670482> [30 September 2014]

¹⁶ Apriadi Tamburaka. 2011. *Revolusi Timur Tengah. Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara – Negara Timur Tengah*. Narasi. Jakarta. Hlm. 237

¹⁷ France24. 2011. *Who's who in Libya's National Transitional Council*. Diakses melalui <http://www.france24.com/en/20110902-whos-who-libyas-national-transitional-council/> [30 September 2014]

¹⁸ *Ibid.*

rakyat Libya yang semakin tidak dapat dibendung, pada tanggal 5 Maret NTC mendeklarasikan diri menjadi pemerintahan yang sah mewakili rakyat Libya dan negara Libya (pemerintahan tandingan Libya).¹⁹ Pendeklarasian berdirinya NTC sebagai pemerintah Libya oleh pihak oposisi merupakan upaya politik dari pihak oposisi untuk menarik simpati masyarakat internasional. NTC menginginkan campur tangan pihak asing untuk mengatasi konflik di Libya.

Keinginan NTC agar pihak asing melakukan intervensi terhadap penyelesaian konflik di Libya, di sambut baik oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Berlangsungnya konflik yang berkepanjangan di Libya, Dewan Keamanan PBB melakukan sidang. Hasil sidang dari DK PBB adalah pengesahan Resolusi DK PBB No. 1973 pada 17 Maret 2011. Isi dari resolusi DK PBB No. 1973 tahun 2011 diantaranya berisi tentang penerapan zona larangan terbang di Libya.²⁰ Resolusi DK PBB No. 1973 tahun 2011 juga dijadikan sebagai dasar intervensi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) terhadap konflik Libya untuk melemahkan kekuatan Gaddafi.

Keberhasilan NTC untuk menarik perhatian pihak asing menjadikan posisinya semakin kuat. NTC bersama pasukan NATO berupaya melumpuhkan kekuatan pasukan Gaddafi dengan melakukan penyerangan di kota-kota Libya yang menjadi basis kekuatan Gaddafi. Pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan bantuan NATO, NTC berhasil membunuh Gaddafi. Gaddafi terbunuh dalam insiden baku tembak antara tentara NTC dengan pasukan loyalis Gaddafi di kota Sirte.²¹ Terbunuhnya Gaddafi merupakan tanda berakhirnya rezim otoriter di Libya.

¹⁹ International Center. 2011. *Op. Cit.* Hlm 22

²⁰ Resolusi PBB Nomor 1973 tahun 2011 tersebut antara lain mengatur mengenai penerapan gencatan senjata (*cease-fire*) dan penghentian seluruh tindakan kekerasan serta penyerangan terhadap penduduk sipil dalam waktu segera; perlunya upaya – upaya yang intensif untuk merumuskan suatu solusi politik yang damai dan berkelanjutan atas krisis di Libya; kewajiban bagi otoritas Libya untuk mematuhi hukum internasional; perlindungan untuk penduduk sipil (*protection of civilians*); pelaksanaan zona larangan terbang (*No Fly Zone*); pelaksanaan embargo senjata (*Enforcement of the Arms Embargo*); dan pembekuan sejumlah asset perorangan, instansi pemerintah maupun perusahaan Libya. Diakses dari: <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm> [30 September 2014]

²¹ Elin Yunita Kristanti. 2011. *Detik-Detik Tewasnya Muammar Khadafi*. Diakses melalui <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/257571-detik-detik-tewasnya-moammar-khadafi> [3 Oktober 2014]

Selanjutnya Libya menjalani proses transisi demokrasi dibawah pemerintahan NTC.

Pada bulan Oktober 2011 Dewan Transisi Nasional (NTC) yang diketuai oleh Mustafa Abdul Jalil mengumumkan kemerdekaan Libya dari kekuasaan otoriter Moammar Gaddafi.²² Lepas dari kekuasaan otoriter Gaddafi, pada tanggal 31 Oktober 2011 NTC segera menyelenggarakan pemilihan Perdana Menteri baru untuk Libya. NTC akhirnya menetapkan Abdurrahim el-Keib sebagai Perdana Menteri Libya untuk menggantikan Mahmoud Jibril. Abdurrahim el-Keib ditetapkan sebagai Perdana Menteri Libya setelah dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh NTC Abdurrahim el-Keib mendapat 26 dari total 51 suara anggota NTC.²³

Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya resmi menjadi pemerintahan sementara Libya pasca terbunuhnya Gaddafi dan bertugas mengawal proses transisi menuju demokrasi di Libya sampai terselenggaranya pemilu parlemen yang demokratis pada bulan Juli 2012. Untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis NTC membuka ruang bagi berdirinya partai politik dan berkompetisi mengisi pemerintahan Libya ditahun 2012. Dari pemaparan singkat ini maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi berjudul “ **TRANSISI DEMOKRASI DI LIBYA PADA TAHUN 2011 – 2014**”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah diperlukan runtutan proses yang jelas dan benar. Untuk memudahkan pembahasan dan menganalisis permasalahan secara sistematis dan terarah, maka diperlukan ruang lingkup pembahasan atas masalah yang ditulis. Karena itu, ruang lingkup pembahasan merupakan salah satu

²² KabarNet. 2011. *Pemerintahan Baru Libya Kembali pada Syariah Islam*. Diakses melalui <http://kabarnet.in/2011/10/24/pemerintahan-baru-libya-menuju-syariah-islam/> [3 Oktober 2014]

²³ Tim Redaksi. 2011. *Tak “Ternoda” Khadafy Dosen itu Pimpin Libya*. Diakses melalui <http://internasional.kompas.com/read/2011/11/05/11125450/Tak.Ternoda.Khadafy.Dosen.Itu.Pimpin.Libya> [5 November 2014]

hal terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Adapun ruang lingkup pembahasan ini terdapat dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Sesuai dengan judul yang penulis ketengahkan maka pembatasan karya ilmiah ini hanya berkisar pada proses transisi demokrasi di Libya. Pengelaborasiannya dimulai dengan menjelaskan berakhirnya rezim otoriter Moammar Gaddafi pada tahun 2011 kemudian dilanjutkan dengan tahapan transisi demokrasi di Libya pasca jatuhnya Gaddafi.

1.2.2 Batasan Waktu

Penulis menggunakan batasan waktu dalam karya ilmiah ini dengan maksud agar tidak menyimpang terlalu jauh dan untuk memudahkan penulis menganalisis dan memahami permasalahan yang ada. Tahun 2011 digunakan sebagai batasan awal karena Libya mulai menempuh jalur demokratisasi yang berujung pada terbunuhnya Moammar Gaddafi. Batasan akhir pembahasan adalah sampai tahun 2014 saat pemilu parlemen ke dua Libya dilaksanakan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penulis menggunakan waktu diluar batasan yang telah ditetapkan selama masih berkaitan terhadap tema yang diangkat.

1.3 Rumusan Masalah

Kemunculan suatu masalah dalam proses penulisan suatu karya ilmiah merupakan kunci utama proses penulisan agar diperoleh pemcahan atas masalah yang diuraikan. Definisi permasalahan yang dikatakan The Liang Gie adalah sebagai berikut:

“Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan hanya melihat saja melainkan kita ingin menyatakan lebih dalam.”²⁴

²⁴ The Liang Gie. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian ,Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm 49

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakan masalah yang ada, maka pokok permasalahan yang akan di analisa adalah **Bagaimana Proses Transisi Demokrasi di Libya pada Tahun 2011 sampai 2014?**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terdapat dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui proses transisi demokrasi di Libya pada tahun 2011 sampai pada tahun 2014.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk memahami setiap fenomena, penulis perlu melakukan penyederhanaan dan konseptualisasi. Suatu konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Merujuk pada pernyataan Mochtar Mas'ood dalam bukunya, "Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi", dinyatakan bahwa ketika menjelaskan suatu fenomena, teori memerlukan pembuktian secara sistematis.²⁵

Demokrasi minimalis menurut Robert A. Dahl mengandung dua dimensi yaitu kontes dan partisipasi. Demokrasi juga mengimplikasikan kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan untuk berbicara, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu.²⁶

Definisi demokrasi dari sudut prosedur ini memberikan sejumlah patokan yang pada pokoknya dikelompokkan dengan mengikuti dua dimensi tersebut yang memungkinkan untuk menilai sejauh manakah suatu sistem politik bersifat demokrasi dan apakah suatu sistem bertambah atau berkurang demokratis.²⁷ Dari penjelasan tersebut, sistem politik demokrasi

²⁵ Mochtar Mas'ood, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta. Hlm 108

²⁶ Robert A. Dahl. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven. Yale University Press. Hlm 10

²⁷ *Ibid.*

mengimplikasikan pemilihan umum secara berkala untuk memilih para calon pembuat keputusan kolektif.

Demokratisasi Menurut Samuel Huntington pada tingkatan yang sederhana mencakup tiga hal yang harus terlaksana, yaitu:²⁸

- (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter
- (2) dibangunnya sebuah rezim demokratis
- (3) pengkonsolidasian rezim demokratis.

Menempuh proses demokratisasi tentu memerlukan pintu masuk yang disebut jalur transisi. Transisi demokrasi di setiap negara terjadi lewat beberapa jalur atau rute yang berbeda – beda. Empat jenis jalur atau rute demokratisasi sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Huntington, yaitu:²⁹

1. Transformasi, terjadi ketika elit yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Dalam transformasi, pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter mensponsori perubahan dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem yang demokratis.
2. *Replacement*, terjadi ketika kelompok Oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi di mana kemudian Rezim Otoriter tumbang atau digulingkan. *Replacement* merupakan sebuah transisi yang matang dan lemah, proses ini sangat tergantung dengan kontinuitas perjuangan dari mereka yang memiliki komitmen yang kuat dengan pembangunan demokrasi.
3. *Transplacement*, terjadi jika demokratisasi merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Kelompok konservatif dalam rezim berada pada posisi yang seimbang dengan pemerintah, tetap pemerintah sendiri hanya bersedia merundingkan perubahan, dan tidak mau memprakarsai perubahan rezim.
4. Intervensi, yaitu campur tangan dari pihak ke tiga untuk melakukan demokratisasi.

²⁸ Samuel P. Huntington. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta Hlm. 45

²⁹ Ibid. Hlm. 147

Secara umum demokratisasi mencakup beberapa proses atau tahapan rumit dan saling berkaitan, yaitu:³⁰

a. Transisi

Transisi merupakan fase peralihan atau perubahan dari suatu fase tertentu ke fase yang lain yang tidak sama dengan fase pertama. Transisi demokrasi diartikan sebagai fase peralihan rezim politik dari tipe otoriter menuju rezim politik pasca otoriter masa transisi umumnya ditandai dengan munculnya liberalisasi, yaitu proses pengaktifan hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan negara atau pihak ketiga.

b. Liberalisasi

Liberalisasi adalah proses pengaktifkan hak-hak politik yang melindungi individu-individu dan kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang dan tidak sah dari negara atau pihak ketiga. Liberalisasi seperti dalam konseptualisasi Dahl yang mencakup konstelasi publik dan partisipasi dalam prosedur kelembagaan seperti pemilihan umum serta terbukanya kesempatan publik untuk mengekspresikan kebebasan politiknya (kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi).

c. Instalasi

Instalasi merupakan pengesahan, seperti dilakukannya perubahan terhadap undang-undang dan melakukan pemilu yang demokratis.

d. Konsolidasi

Konsolidasi demokrasi menurut O'Donnell dan Schmitter, dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi politik adalah lembaga atau institusi politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik. Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut nilai-nilai politik yang bisa mendekatkan dan mempertemukan

³⁰ Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta:LP3ES.Hlm 79.

berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.³¹

Dari pemaparan konsep di atas demokratisasi di Libya sejak bulan Februari 2011 terjadi ketika rakyat Libya merasa kecewa terhadap kondisi sosial dan politik selama Gaddafi memerintah. Selama 40 tahun lebih, pemerintahan Gaddafi dianggap otoriter, sejak tahun 1972 tidak diperbolehkan adanya partai politik di Libya, sulitnya mencari pekerjaan, dan seringkali pemerintahan Gaddafi bertindak represif kepada kelompok atau individu yang berusaha menentang pemerintahannya.

Kekecewaan rakyat Libya diluapkan melalui aksi demonstrasi sejak pertengahan Februari 2011. Mahasiswa, aktivis HAM, dan beberapa elit pemerintahan Gaddafi yang pro terhadap perwujudan demokrasi tergabung dalam kelompok oposisi yang dimotori oleh *National Transitional Council* (NTC). Revolusi rakyat Libya berakibat pada terbunuhnya Gaddafi. Pada bulan Oktober 2011 Gaddafi terbunuh di kota Sirte. Dalam aksi revolusi tersebut NTC dibantu oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO).

Terbunuhnya Gaddafi oleh revolusi rakyat menandakan bahwa kekuasaan rezim otoriter Gaddafi telah berakhir. maka tahapan selanjutnya adalah transisi demokratisasi, pertama adanya transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi namun tidak menutup kemungkinan dalam masa transisi tetap dipimpin oleh pemerintah diktator. Pasca lengsernya Gaddafi pemerintahan digantikan oleh NTC yang diketuai oleh Mustafa Abdel Jalil (5 Maret 2011 – 8 Agustus 2012). Dibawah pimpinan Mustafa Abdel Jalil, NTC sebagai pemerintahan transisi setelah lengsernya Gaddafi melakukan liberalisasi politik dengan cara diperbolehkannya partai politik untuk berkompetisi mengisi jabatan pemerintahan Libya dan kebebasan pers menulis berita dengan menyertakan nama narasumber.

Tahapan selanjutnya dalam demokratisasi adalah proses instalasi dan konsolidasi demokrasi. Pada tahap ini ada beberapa indikator instalasi demokrasi di Libya. Instalasi demokrasi tersebut ditandai dengan perubahan dan pengesahan undang-undang baru oleh pemerintahan sementara Libya (NTC) setelah rezim

³¹*Ibid.* Hlm 6-24

Gaddafi tumbang. Sedangkan sejak berakhirnya rezim otoritarian Gaddafi sampai pada terselenggaranya pemilihan umum yang ke dua pada tahun 2014 demokrasi di Libya belum terkonsolidasi. Hal tersebut ditandai dengan kegagalan rekonsiliasi nasional Libya.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama dalam penelitian ini adalah transisi demokratisasi di Libya terjadi melalui jalur atau tipe gabungan yaitu *replacement* dan intervensi. Setelah melalui dua jalur pintu masuk transisi demokratisasi, selanjutnya Libya menjalani proses tahapan-tahapan transisi demokrasi. Ada pun proses yang telah dijalani dari tahun 2011 sampai pada tahun 2014 adalah, transisi yang ditandai dengan peralihan kekuasaan pemerintah dari pemerintahan Gaddafi diambil alih oleh National Transitional Council (NTC), liberalisasi ditandai dengan telah diselenggarakannya dua kali pemilihan umum anggota parlemen yaitu pada tanggal 7 Juli 2012 dan 25 Juni 2014, proses instalasi ditandai dengan perubahan undang-undang Libya diantaranya UU. Libya No. 71 tahun 1972 diganti dengan UU. Libya No. 29 tahun 2012 tentang kebebasan berpolitik, dan proses konsolidasi di Libya sampai pada tahun 2014 belum tercapai, hal tersebut ditandai dengan kegagalan rekonsiliasi keamanan dan politik Libya.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah guna memperoleh informasi dan menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah yang telah di tentukan sebelumnya. Menurut definisi The Liang Gie, metodologi adalah:

“Cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala pada ujung awalnya. Ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data – data, sedangkan pada ujung akhirnya untuk meluruskan kebenaran pernyataan yang disebut mengenai gejala tersebut.”³²

³² The Liang Gie. *Op. Cit.* Hlm. 81

Dari definisi tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa metode merupakan panduan dalam suatu proses pengumpulan data sampai dengan proses analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif *case study*,³³ yaitu penelitian yang fokus kepada individu, grup, komunitas dan kejadian tertentu. Setelah melalui proses pengumpulan dan analisis data, maka pernyataan dari jawaban yang didapat akan disesuaikan pada gejala-gejala atau variabel yang muncul dalam permasalahan. Ada pun teknik dalam penelitian ini mencakup dua cara yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dalam proses penelitian ini. Data yang penulis pergunakan merupakan data skunder, yang berarti penulis tidak berinteraksi langsung dengan objek yang dikaji. Rujukan pustaka dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Buku – buku koleksi pribadi
4. Media internet

1.7.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ditujukan untuk mendapatkan kesimpulan yang ilmiah dan objektif. Karena data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung maka metode yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan tipe analisa yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif kualitatif.

³³ K.Yin. Robert. 2003. *Case Study Research: Design and Method Third Edition*. Sage Publication, Inc. United Staes of America.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memberi pemaparan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Kondisi Politik Di Libya Pada Era Kepemimpinan Muammar Gaddafi

Bab ini memberi pemaparan tentang kondisi politik otoriter di Libya pada era kepemimpinan Moammar Gaddafi sehingga rakyat Libya memberontak.

Bab III. Upaya *National Transitional Council* (NTC) dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam Penggulingan Kepemimpinan Muammar Gaddafi

Bab ini menjelaskan tentang perlawanan rakyat Libya terhadap rezim otoritarian Muammar Gaddafi 2011. Dalam hal ini dilakukan oleh NTC dan dibantu oleh NATO.

Bab IV. Transisi Politik Libya Menuju Demokrasi Pasca Jatuhnya Muammar Gaddafi

Bab ini menjelaskan proses transisi di Libya sampai diselenggarakannya pemilihan umum demokratis Libya pada tahun 2014.

Bab. V. Kesimpulan

Bab terakhir dalam skripsi ini berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari bab-bab pembahasan sebelumnya.

BAB 2. KONDISI POLITIK DI LIBYA PADA ERA KEPEMIMPINAN MUAMMAR GADDAFI

Libya adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Afrika. Wilayah negara Libya berbatasan dengan Mesir di sebelah timur, Laut Mediterania sebelah utara, Sudan, Chad dan Niger di sebelah selatan, serta Tunisia dan Aljazair di sebelah barat. Libya memiliki luas wilayah 1.759.540 km². Ibu kota Negara Libya adalah Tripoli. Tripoli merupakan kota terbesar di Libya dengan jumlah penduduk 1,7 juta dari jumlah keseluruhan penduduk Libya 6.579.960 jiwa. Negara Libya merupakan negara multi etnis yang terdiri dari etnis Arab, Barbar, Malta, Italia, Yunani dan lain-lain. Etnis Arab menjadi etnis mayoritas di Libya. Sekitar 90% penduduk Libya adalah etnis Arab.³²



Gambar 1. Peta Negara Libya³³

³² Central Intelligence Agency. 2013. *The World Factbook: Libya*. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html> [2 Januari 2015]

³³ Mapsofworld.com. 2013. *Libya Map*. Diakses melalui <http://www.mapsofworld.com/libya/> [2 Januari 2015]

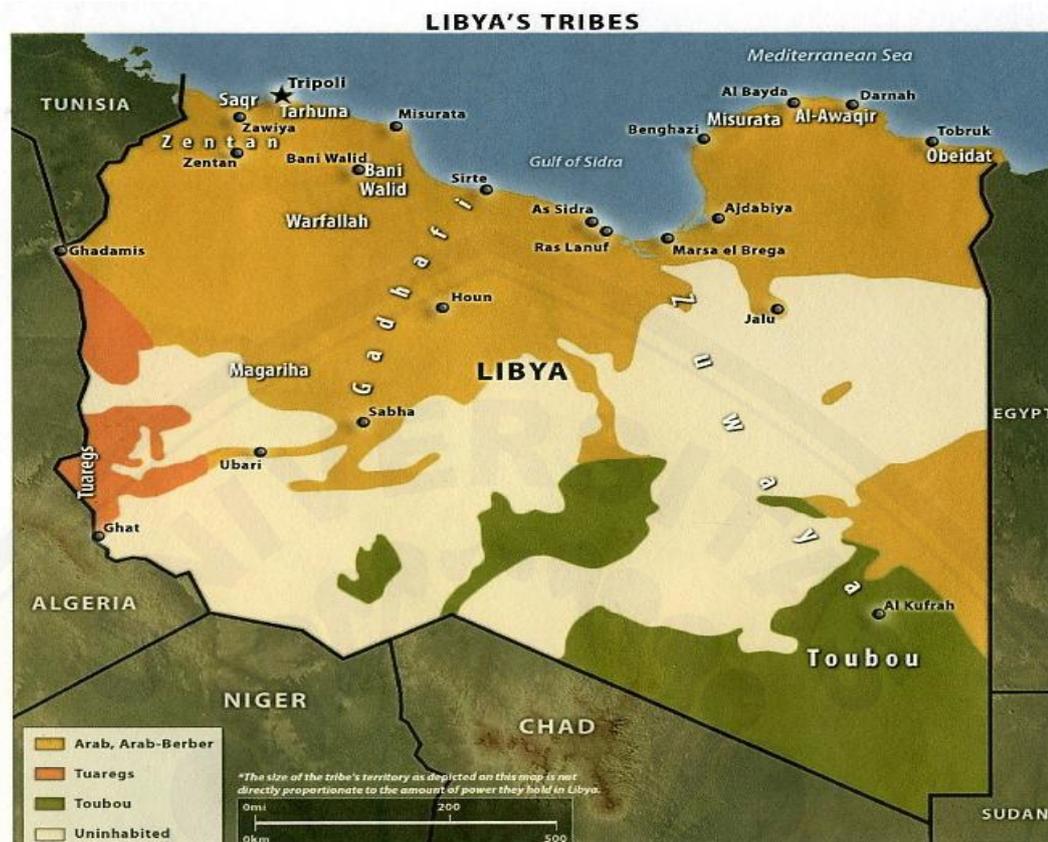
Terdapat sekitar 140 suku yang mendiami wilayah Libya. Beberapa suku tersebut diantaranya adalah suku Warfala, Tarhunah dan Warsyifana. Ketiga suku tersebut mendiami wilayah Libya bagian barat. Wilayah Libya bagian timur terdapat suku al-Ubaidat dan al-Awaqir. Wilayah Libya bagian selatan mayoritas dihuni oleh suku Aulad Sulaiman, suku Az-Zawiyah dan suku al-Hasawinah. Sedangkan di wilayah Libya bagian utara terdapat suku Tuareg, suku berkulit hitam (keturunan Sahara Afrika), suku Toubu, suku Bani Walid dan suku Sabha.³⁴

Sedangkan Gaddafi sendiri berasal dari suku Gaddadfa. Suku Gaddadfa keberadaannya tersebar di tiga kota yaitu, Sirte, Tripoli dan Benghazi. Jumlah populasi suku Gaddadfa tidak begitu besar. Jumlah populasi terbesar berasal dari suku Warfala dimana dari jumlah total penduduk Libya 6,5 juta terdapat satu juta suku Warfala. Akan tetapi, Libya pada era kepemimpinan Gaddafi suku Gaddadfa dikenal sebagai suku yang paling sejahtera kehidupannya. Gaddafi banyak memasukkan tokoh-tokoh dari suku Gaddadfa di dalam jabatan pemerintahannya.³⁵ Sementara suku Toubu yang tinggal di wilayah Kufrah dan Sabha dan suku Berber non-Arab (suku berkulit hitam) mendapat perlakuan diskriminatif oleh Gaddafi. Suku Toubu yang bertempat tinggal di daerah pegunungan Tibesti, perbatasan Libya dan Chad tidak diberi status kewarganegaraan oleh pemerintah Libya pada era kepemimpinan Gaddafi. Sejak Gaddafi menggalang Persatuan Arab, suku Toubu juga sering diperangi oleh milisi suku Arab. Melihat tindakan suku Arab yang memerangi suku Toubu, Gaddafi sebagai pemimpin Libya tidak mengambil tindakan apa-apa. Hal tersebut juga dialami oleh suku Berber non-Arab yang jumlah populasinya paling sedikit dari suku-suku yang lain.³⁶ Berikut peta persebaran suku di Libya:

³⁴ Louis Dupree. 1958. *The Non-Arab Ethnic Group of Libya*. Middle East Institute. Washington. Vol.12 Hlm. 33 Diakses melalui http://www.jstor.org/stable/4322977?seq=1#page_scan_tab_contents [7 September 2015]

³⁵ Elizabeth Piper. 2011. *Factbox: Libya's Tribal, Culture Divisions*. Diakses melalui <http://www.reuters.com/article/2011/08/25/us-libya-tribes-idUSTRE77O43R20110825> [8 September 2015]

³⁶Refworld. 2014. *Libya: Situation of The Tebu Ethnic Group And Their Advocates Includig Treatment by Society And Authorities; Relationship With Other Ethnic Groups*. Diakses melalui <http://www.refworld.org/docid/54ca11984.html> [8 September 2015]



Gambar 2. Peta Persebaran Suku di Libya.³⁷

Negara Libya merdeka dari penjajahan Italia pada bulan Desember 1951. Kemerdekaan tersebut didapat setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi dan mengatakan bahwa Libya harus segera merdeka sebelum 1 Januari 1952. Selanjutnya, Libya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 24 Desember 1951. Kemerdekaan Libya didapat melalui PBB. Sejak itu Libya menjadi negara monarki konstitusional dibawah kepemimpinan Raja Idris.³⁸ Selama 17 tahun Raja Idris berkuasa di Libya, Raja Idris cenderung mengutamakan kepentingan keluarganya, kelompok keagamaan tarekat Sufi Sanusiyah dan kepentingan basis kekuasaannya di wilayah Cyrenaica. Raja Idris telah mengabaikan kepentingan mayoritas rakyat Libya yang berada di

³⁷ Scott Anderson. 2003. *Libya's Colonel Muammar Gaddafi*. Diakses melalui <http://www.orwelltoday.com/libgaddafitent.shtml> [7 September 2015]

³⁸ Aulia Akbar. 2012. *Mengenal Libya Kuno*. Diakses melalui <http://news.okezone.com/read/2012/08/17/412/679226/mengenal-libya-kuno> [7 September 2015]

wilayah lain. Banyak dari kalangan anggota tarekat keagamaan Sufi Sanusiyah yang mengisi jabatan pemerintahan Libya. Tarekat Sufi Sanusiyah merupakan kelompok keagamaan yang didirikan oleh kakek Raja Idris.³⁹ Libya dibawah pemerintahan monarki Raja Idris dikuasai oleh kelompok Dinasti Senussi. Dimana Raja Idris sebagai keturunan dinasti Senussi banyak menempatkan anggota keluarga kerajaan untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan Libya.

Saat terjadi kudeta tidak berdarah pada 1969 yang dipimpin oleh Gaddafi maka kekuasaan Raja Idris di Libya berakhir. Keluarga Dinasti Senussi banyak yang melarikan diri dan tinggal di luar negeri. Keturunan Dinasti Senussi keberadaannya tersebar di berbagai negara Eropa seperti, Inggris, Spanyol dan Itali. Di antara anggota keluarga Dinasti Senussi yang berada di pengasingan adalah Pangeran Idris bin Abdullah al-Senussi yang tinggal di Spanyol bersama istrinya Ana Maria (aristokrat Spanyol) dan Mohammed al-Senussi (saudara sepupu dari pangeran Idris bin Abdullah al-Senussi).⁴⁰

Setelah kekuasaan berganti dari tangan Raja Idris ke tangan Gaddafi, kemudian Gaddafi membangun kekuatan legitimasi pemerintahannya dengan mempersatukan tiga suku besar di Libya. Ketiga suku di Libya terdiri dari suku Gadaddfa, Warfala dan al-Magariha. Ketiga suku tersebut menjadi tulang punggung pemerintahan Gaddafi di Libya. Suku-suku di Libya tidak berpihak kepada faksi politik tertentu, namun mereka lebih loyal terhadap anggota sukunya. Besarnya jumlah anggota ketiga suku tersebut dapat digunakan sebagai kekuatan legitimasi kekuasaan Gaddafi.⁴¹ Penyatuan ketiga suku tersebut juga sebagai antisipasi kembalinya kelompok Senussi untuk merebut kekuasaan.

Pada masa pemerintahan Gaddafi terjadi peningkatan pendapatan ekonomi negara Libya. Sebelumnya, pada era kepemimpinan Raja Idris *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita tertinggi mencapai \$ 1.018 di tahun 1967. Raja Idris mampu mengangkat perekonomian Libya dimana pada tahun 1950-an

³⁹ Endang Mintarja. 2006. *Politik Berbasis Agama Perlawanan Muammar Qadhafi Terhadap Kapitalisme*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 103

⁴⁰ Kompas.com. 2015. *Khadafy Lenyap, Masalah Dinasti Muncul*. Diakses melalui <http://internasional.kompas.com/read/2011/10/28/04425556/khadafy.lenyap.masalah.dinasti.muncul> [7 September 2015]

⁴¹ Trias Kuncahyono. 2011. *Membaca Peta Libya*. Kompas. Hlm. 10

GDP perkapita Libya sebesar \$ 40.⁴² Pemerintahan Gaddafi mampu mengangkat perekonomian di Libya. Libya yang kaya akan minyak, gas dan gypsum. Kekayaan alam Libya dikelola dengan maksimal oleh pemerintahan Gaddafi, sehingga sumber pendapatan Libya dari ekspor minyak mencapai 95 %. Dengan jumlah penduduk yang kecil dan pendapatan yang besar, diperkirakan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita Libya mencapai \$ 13.400 pada tahun 2010.⁴³ GDP Libya pada tahun 2010 mencapai \$ 63,06 miliar.⁴⁴ Sedangkan pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk sekitar 6,5 juta jiwa GDP per kapita Libya mencapai \$ 14.000 dan GDP Libya mencapai \$ 74,23 miliar.⁴⁵

Akan tetapi terdapat sisi negatif selama pemerintahan Gaddafi di Libya. Tingkat pendapatan per kapita Libya yang tergolong negara dengan ekonomi berpendapatan menengah keatas tidak diimbangi dengan penurunan angka pengangguran di Libya. Dalam rentang waktu antara tahun 2009-2010 angka pengangguran Libya mencapai 20,74 %, 16% dari penduduk Libya atau sebanyak 886.978 keluarga di Libya tidak memiliki penghasilan yang tetap dan lebih dari 33.000 keluarga tidak memiliki tempat tinggal.⁴⁶

2.1 Sistem Politik dan Pemerintahan Libya

Pada tahun 1969, Gaddafi bersama 12 anggota militer yang tergabung dalam Dewan Komando Revolusi melakukan kudeta tak berdarah menggulingkan kekuasaan Raja Idris. Ke 12 anggota Dewan Komando Revolusi tersebut adalah Kolonel Muammar Gaddafi, Mayor Abd as Salam Jalud, Mayor Bashir Hawadi,

⁴² Ragaei El Mallakh. 1969. *The Economic of Rapid Growth: Libya*. Middle East Journal. Middle East Institute Vol. 23 No.3 Hlm 308. Diakses melalui http://www.jstor.org/stable/4324474?seq=1#page_scan_tab_contents [8 September 2015]

⁴³ Hafizullah Emadi. 2010. *Libya: The Road to Regime Change*. Diakses melalui <http://www.worlddialogue.org/content.php?id=541> [7 September 2015]

⁴⁴ IMF. 2010. *Middle East and North Africa (developing only)*. Diakses melalui <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2010&scsm=1&ssd=1sort=country&ds=.&br=1&c=672&s=NGDP%2CNGDPDPC%2CPPGDP%2CPPPPP%2CLP&grp=0&a=&pr.x=46&pr.y=14> [7 September 2015]

⁴⁵ CIA. 2011. *The World Factbook*. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html> [7 September 2015]

⁴⁶ Renne R.A Kawilarang. 2011. *Harta di Balik Jubah Sang Kolonel*. Diakses melalui <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/207837-harta-di-balik-jubah-sang-kolonel-> [8 September 2015]

Kapten Muhktar Abdallah Gerwy, Kapten Abd al Tahir al Munim Huni, Kapten Mustapha al Kharubi, Kapten al Khuwaylidi al Hamidi, Kapten Muhammad Nejm, Kapten Ali Awad Hamza, Kapten Abu Bakar Yunus Jaber, Kapten Omar dan Kapten Abdallah al Muhasyi. Kudeta 1 September 1969 yang dilakukan oleh Dewan Komando Revolusi berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Idris di Libya. Keberhasilan Gaddafi bersama 12 anggota Dewan Komando Revolusi kemudian diikuti oleh peralihan pemerintahan dari Raja Idris kepada Dewan Komando Revolusi.⁴⁷ Sejak lengsernya Raja Idris pada bulan September tahun 1969 Dewan Komando Revousi menjadi pemegang otoritas tertinggi pemerintahan di Libya.

Seminggu setelah lengsernya Raja Idris kemudian 12 Anggota Dewan Komando Revolusi mengadakan sidang. Sidang yang digelar oleh Dewan Komando Revolusi secara aklamasi menyetujui Muammar Gaddafi sebagai pemimpin Dewan Komando Revoulusi.⁴⁸ Selain itu, dalam sidang tersebut menghasilkan beberapa keputusan yang dituangkan dalam Konstitusi Libya tahun 1969. Keputusan yang tertuang dalam Konstitusi Libya tahun 1969 diantaranya adalah bentuk negara Libya tidak lagi Monarki melainkan berganti Republik dimana kekuasaan berasal dari rakyat.⁴⁹ Republik Arab Libya disebutkan dalam konstitusi Libya 1969 dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Dewan Komando Revolusi.

Pada tanggal 12 Juni tahun 1971 Gaddafi mengumumkan pendirian partai politik yaitu *Arab Socialist Union* (ASU). Menurut Gaddafi, pada saat masa transisi kondisi negara harus kuat agar perbaikan berjalan efektif. Oleh karena itu pada masa transisi, Gaddafi menciptakan partai tunggal bagi Libya.⁵⁰ Pendirian partai politik oleh Gaddafi bertujuan memobilisasi massa untuk partisipasi politik. Selain itu, seperti di negara lain penganut sistem partai tunggal, partai bersifat

⁴⁷ Dirk Vandewalle. 2011. *Libya Since 1969*. Diakses melalui <http://www.thehistoryreader.com/contemporary-history/libya-since-1969/> [7 September 2015]

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ United Nations. 2010. *Libya Constitution 1969*. Diakses melalui <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan004643.pdf> [7 September 2015]

⁵⁰ Dirk Vandewalle. 2011. *Loc. Cit.*

memaksa masyarakat untuk menerima persepsi dari seorang pimpinan partai.⁵¹ Sifat pemaksaan persepsi tersebut dalam perkembangan sistem kepartaian di Libya pada era kepemimpinan Gaddafi menimbulkan kegaduhan di dalam partai. Mengingat bahwa masyarakat Libya yang majemuk. Setiap suku di daerah-daerah Libya memiliki pandangan sosial, politik dan ekonomi yang berbeda. Dalam perkembangannya, pada tahun 1975 Gaddafi secara resmi membubarkan sistem kepartaian di Libya dengan mengeluarkan kebijakan undang-undang Libya No. 71 tahun 1972 dimana negara melarang adanya partai politik di Libya.⁵² Peran partai politik dirasa tidak mampu mengintegrasikan berbagai golongan yang berbeda di Libya. Kegagalan *Arab Socialist Union* sebagai partai politik pemerintah menjadi alasan Gaddafi untuk membubarkannya.

Sistem kepartaian yang dianggap gagal diterapkan di Libya, membuat Gaddafi bersama 12 anggota Dewan Komando Revolusioner melakukan perbaikan terhadap sistem politik dan pemerintahan di Libya. Perbaikan tersebut dilakukan dengan melakukan amandemen Konstitusi Libya tahun 1969 dan diganti dengan Konstitusi baru Libya yang disebut *The Green Book* (Buku Hijau). Konstitusi tersebut dibuat berdasarkan pemikiran Gaddafi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. *The Green Book* sebagai konstitusi Libya berlaku hingga tahun 2011.⁵³ Dalam amandemen Konstitusi Libya, yang tampak berbeda dengan sebelumnya adalah penghapusan partai politik dan pengukuhan kedudukan Dewan Komando Revolusioner yang posisi keanggotaannya tidak dapat diganggu gugat atau diganti karena keterlibatan 12 anggota Dewan Komando Revolusi dalam Revolusi Libya tahun 1969. Dewan Komando Revolusioner sebagai pemegang otoritas tertinggi negara Libya.

Secara sederhana sistem pemerintahan Libya pada era kepemimpinan Gaddafi terbagi menjadi dua cabang yaitu, cabang Revolusioner dan cabang Jamahiriya. Cabang Revolusioner terdiri dari Dewan Komando Revolusi dan

⁵¹ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 416

⁵² Countrydata.com. 2010. *Libya: Opposition to Qadhafi*. Loc. Cit

⁵³ Magdalena S. 2008. *Profil: Muammar Gaddafi, “Singa Tua” dari Libya*. Diakses melalui <http://www.erasuslim.com/berita/dunia-islam/profil-muammar-gaddafi-quot-singa-tua-quot-dari-libya.htm#.VUGXc44rmXg> [2 Januari 2015]

Komite Revolusi. Cabang Revolusioner dipimpin oleh ketua Dewan Komando Revolusi, dalam hal ini adalah Muammar Gaddafi. Posisi keanggotaan Dewan Komando Revolusi tidak dapat diganti. Anggota Dewan Komando Revolusi didasarkan pada keterlibatan 12 orang para elit militer dalam Revolusi Libya pada bulan September 1969.⁵⁴ Sedangkan Komite Revolusioner anggotanya merupakan orang-orang yang dipilih oleh Dewan Komando Revolusi. Kebanyakan orang-orang yang dipilih sebagai anggota Komite Revolusi adalah mereka yang loyal kepada Gaddafi. Mereka berasal dari pasukan paramiliter, kepala suku, dan orang-orang upahan.⁵⁵ Maka dari itu, Komite Revolusi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komando Revolusi.

Ada pun cabang Jamahiriya terdiri dari Kongres Rakyat (*People's Congress*) dan Komite Rakyat (*People's Committee*). Fungsi Kongres Rakyat adalah merancang keputusan dan sekaligus melakukan fungsi pengawasan terhadap Komite Rakyat. Sedangkan Komite Rakyat, menjalankan mandat dari Kongres Rakyat. Oleh karena itu, jumlah anggota kongres rakyat lebih besar dari jumlah komite rakyat. Komite Rakyat dalam tugasnya bertanggung jawab pada Komite Revolusi.

Menurut tingkatannya struktur paling bawah atau setingkat dengan kota disebut dengan *Basic People Conferences* (BPC). Keanggotaannya adalah setiap warga Libya yang ingin menyampaikan aspirasi dan telah berumur 19 tahun. Pada tingkat pusat ada *General People's Congress* (GPC) yang menampung aspirasi dari tingkat BPC. Anggota dari GPC merupakan utusan-utusan yang diberi mandat oleh BPC dari setiap kota. Komite Rakyat (*People's Committee*) juga serupa menurut tingkatannya dengan Kongres Rakyat. Pada tingkat pusat, Komite rakyat disebut *General People's Committee* dimana keanggotaannya merupakan Sekretaris Jendral dari Komite Rakyat dan dua anggota sekretaris Komite Rakyat yang berasal dari tiap-tiap provinsi.

⁵⁴ Apriadi Tamburaka. 2011. *Op. Cit* Hlm 219

⁵⁵ Nurani Soyomukti dan Muhammad Iqbal. 2011. *Op. Cit.* Hlm 144

2.2 Lembaga – Lembaga Politik Pemerintahan di Libya

2.2.1 Lembaga Kepresidenan

Lembaga kepresidenan di Libya pada era Gaddafi diisi oleh Dewan Komando Revolusioner yang beranggotakan 12 orang dan kabinet *General People's Committee* (GPC). Dewan Komando Revolusioner dipimpin oleh Gaddafi dimana jabatannya diperoleh dari kesepakatan 12 anggota elit militer Libya yang berjuang bersama Gaddafi dalam revolusi Libya pada bulan September tahun 1969. Sedangkan kabinet *General People's Committee* dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.

Lembaga kepresidenan dalam sistem Jamahiriya yang dibentuk oleh Gaddafi tidak memiliki pemimpin sebagai kepala negara secara formal. Tetapi secara politis kedudukan Gaddafi adalah sebagai pemimpin negara Libya. Posisi Gaddafi sebagai pemimpin Libya disebabkan oleh posisi Dewan Komando Revolusi yang tidak dapat diganti. Sejak kepemimpinannya, sistem Jamahiriya yang dibentuk oleh Gaddafi memiliki kecenderungan penerapan konsep demokrasi langsung (*direct democracy*), dimana suatu pemerintahan dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat Libya.⁵⁶ Ada pun pengertian secara langsung dalam konteks pemerintahan Gaddafi tersebut adalah setiap keputusan politik dijalankan melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan dari struktur pemerintahan paling bawah melalui Kongres Rakyat atau *Basic People Congress* (BPC). Kongres Rakyat atau BPC merupakan pemerintahan tingkat kota. Pada setiap kota, BPC membentuk Komite Rakyat (*People's Committes*) dimana tugas Komite Rakyat adalah melaksanakan keputusan dan rekomendasi dari Kongres Rakyat. Pada tingkat nasional, musyawarah dilakukan oleh Komite Rakyat Umum (*General People's Committees*) sebagai kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dan Komite Revolusi. Akan tetapi yang memiliki hak untuk memutuskan suatu kebijakan adalah Pimpinan Dewan Komando Revolusi yang juga menjabat sebagai ketua Komite Rakyat.

⁵⁶ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm 109

Kekuasaan Presiden pasca Revolusi 1969 diatur dalam Proklamasi Konstitusi Libya 1969 yang menjadi Undang-Undang dasar Libya. Dalam Proklamasi Konstitusi Libya tahun 1969 Bab II tentang sistem pemerintahan pasal 18 disebutkan bahwa Dewan Komando Revolusi memiliki otoritas tertinggi di Libya. Eksekusi kebijakan negara berada dibawah Komite Revolusi. Sedangkan menurut pasal 19 Proklamasi Konstitusi Libya tahun 1969 Dewan Komando Revolusi memiliki kewenangan menunjuk Perdana Menteri dan Dewan Menteri.⁵⁷ Menurut undang-undang Libya tersebut nampak kekuasaan Dewan Komando Revolusi yang diketuai oleh Gaddafi sangat besar. Dewan Komando Revolusi memiliki kewenangan memilih Perdana Menteri beserta Menteri dan juga membubarkan parlemen. Meski keputusan diambil secara kolektif oleh anggota Dewan Komando Revolusi namun dalam prakteknya peran Gaddafi sebagai ketua lebih dominan.

2.2.2 Lembaga Perwakilan Rakyat

Sistem politik demokrasi melalui perwakilan yang diterapkan di negara-negara Barat menurut Gaddafi secara substansial bukanlah sistem politik yang demokratis. Sistem perwakilan parlemen merupakan sistem politik demokrasi yang salah arah. Menurut Gaddafi, demokrasi berarti kedaulatan rakyat dan kedaulatan rakyat tidak dapat diwakili. Kedaulatan hanya dapat dilakukan oleh dirinya sendiri. Sistem keterwakilan merupakan bentuk kediktatoran dengan adanya penindasan dari kalangan mayoritas terhadap kalangan minoritas.⁵⁸ Selain itu parlemen yang lahir dari sebuah mekanisme pemilihan umum melalui partai politik tidak dapat disebut lembaga perwakilan rakyat. Hal itu disebabkan didalam parlemen yang berkuasa adalah partai dan bukan oleh rakyat. Suara yang diberikan oleh rakyat terhadap anggota parlemen dapat dimanipulasi karena suara rakyat dapat dibeli.⁵⁹

⁵⁷ Temehu.com. 2006. *Libya Arab Jamahiriya Constitution 1969*. Diakses melalui <https://www.temehu.com/NTC/libyan-arab-jamahiriya-constitution-1969.pdf> [12 September 2015]

⁵⁸ Zakiyuddin Baydhawi. 2000. *Menapak Jalan Revolusi*. Insist Press dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm 9

⁵⁹ *Ibid.*

Oleh karena itu, sebagai ganti dari lembaga perwakilan rakyat di Libya Gaddafi membentuk Kongres Rakyat dan Komite Rakyat. Sebagai instrument pemerintahan, keduanya, memiliki fungsi yang berbeda. Kongres Rakyat menjalankan fungsi sebagaimana lembaga legislatif yaitu fungsi pengawasan dan pembuatan undang-undang. Komite Rakyat menjalankan fungsi sebagai lembaga eksekutif menjalankan hasil dari keputusan Kongres Rakyat.⁶⁰ Komite Rakyat dalam *The Green Book* (Buku Hijau) bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat.⁶¹

Namun dalam prakteknya fungsi lembaga eksekutif dan legislatif menjadi tidak jelas. Manakala peran keotoriteran kepemimpinan Gaddafi di Libya mendominasi pemerintahan. Dalam perjalanannya sebagai pemimpin Libya, Gaddafi pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Libya ketika Libya menganut sistem partai tunggal. Setelah sistem kepartaian dihapus dan digantikan dengan demokrasi langsung dimana Kongres Rakyat dan Komite Rakyat digunakan sebagai instrument pemerintahan, Gaddafi menjabat sebagai Sekertaris Umum Kongres Rakyat pada tahun 1973. Posisi Sekertaris Umum sebagai ketua Kongres Rakyat membuat dirinya dapat menjalankan kehendaknya dengan tanpa adanya rintangan. Pada tahun 1980 an Gaddafi keluar dari pemerintahan. Akan tetapi menganggap Dewan Komando Revolusioner sebagai pembimbing revolusi Libya. Oleh karena itu, sampai pada tahun 2011 Gaddafi secara politis tetap menjadi pemimpin Libya.

2.3 Mekanisme Pembuatan Kebijakan Politik di Libya

Sejak pengesahan Proklamasi Konstitusi Libya 1969 sebagai undang-undang dasar negara Libya dan penerbitan *The Green Book* (Buku Hijau bagian pertama) sebagai pedoman kehidupan bernegara di Libya pada tahun 1973, dilakukan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Libya. Kongres Rakyat sebagai badan pengawas dan pembuat kebijakan. Komite Rakyat sebagai badan

⁶⁰ W.B. Fisher. 1993. *Libya: The Middle East and North Africa*. Europe Plication Limited. London. Hlm . 667

⁶¹ Mathaba.net. 2011. *The Green Book Part One*. Diakses melalui <http://www.mathaba.net/gci/theory/gb1.htm#instrument> (12 September 2015)

pelaksana kebijakan. Komite Rakyat pada tingkat nasional bertanggung jawab pada Dewan Komando Revolusi dan dalam melaksanakan kebijakannya diawasi oleh Komite Revolusi. Dimana keanggotaan Komite Revolusi ditunjuk langsung oleh Dewan Komando Revolusi.⁶²

Pengambilan keputusan untuk menjadi sebuah kebijakan di Libya, dimulai dari Kongres Tingkat Dasar atau *Basic Popular Congress* (BPC). Sebagai instrument pemerintahan Libya, BPC melakukan konferensi guna menyampaikan aspirasi dari setiap individu, suku, atau daerah-daerah di Libya. BPC merupakan instrument pemerintah ditingkat kota. Sedangkan pada tingkat nasional, peran BPC digantikan oleh *General People Congress* (GPC).

Setelah BPC melakukan konferensi, BPC memilih seorang sekretaris sekaligus untuk dijadikan utusan sebagai anggota Komite Rakyat pada tingkat kota. Komite Rakyat di tingkat kota merupakan anggota Kongres Rakyat tingkat nasional atau disebut Kongres Umum Rakyat atau *General People Congress* (GPC). Proses pengambilan keputusan untuk dijadikan sebuah kebijakan dilakukan melalui sidang yang dihadiri oleh Sekretaris Umum Kongres, Komite Rakyat dan Dewan Komando Revolusi. Keputusan dapat diambil untuk dijadikan sebuah kebijakan apabila disetujui oleh ketua Dewan Komando Revolusi. Ketua Dewan Komando Revolusi, dijabat oleh Gaddafi sebagai Pemimpin dan Pembimbing Revolusi.

Dalam aturan ketatanegaraan Libya, Komite Rakyat merupakan tanggungjawab dari Dewan Komando Revolusi. Oleh karena itu, anggota Komite Rakyat bertanggung jawab langsung dan tunduk kepada Dewan Komando Revolusi. Dewan Komando Revolusi juga memiliki kewenangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Komite Revolusi dan Komite Rakyat. Seperti keputusan yang diambil oleh Gaddafi sebagai ketua Dewan Komando Revolusi dalam mendukung kelompok-kelompok penentang Amerika Serikat.

⁶² Temehu.com. 2006. *Loc. Cit*

2.4 Politik Luar Negeri Libya pada Era Muammar Gaddafi

Libya dibawah kepemimpinan Gaddafi dikenal sebagai negara yang tidak pro terhadap negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan beberapa negara-negara Eropa. Hal tersebut ditunjukkan oleh Gaddafi dengan memberikan dukungan pada Palestina saat terjadi konflik antara Palestina dan Israel. Gaddafi memberikan bantuan senjata militer kepada kelompok perjuangan rakyat Palestina untuk bebas dari pendudukan Israel.⁶³ Melihat dukungan Libya terhadap Palestina, Amerika Serikat sebagai sekutu Israel bereaksi keras. Amerika menganggap bahwa Libya adalah pendukung terorisme. Akibatnya hubungan Libya dan Amerika Serikat semakin memanas. Pada tahun 1981 Amerika Serikat segera menarik perwakilan diplomatnya dari negara Libya sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap negara Libya.⁶⁴

Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat menganggap bahwa Libya di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi merupakan sosok negara teroris. Bahkan secara terang-terangan majalah *Newsweek* menobatkan Gaddafi sebagai “*the most dangerous man in the world*” (manusia paling berbahaya di dunia). Amerika Serikat menganggap negara Libya pada era kepemimpinan Gaddafi sebagai sponsor bagi kelompok-kelompok terorisme.⁶⁵

Pada tanggal 5 April 1986 agen-agen Libya dianggap telah melakukan aksi terorisme dengan meledakkan sebuah klab malam di Berlin, Jerman. Insiden tersebut telah menewaskan tiga orang dan 229 orang terluka. Sebanyak 50 orang yang terluka, setelah dilakukan proses identifikasi adalah anggota militer Amerika Serikat yang sedang berlibur. Peristiwa tersebut membuat Ronald Reagan sebagai presiden Amerika Serikat merasa kesal. Bentuk kekesalan Amerika Serikat berlanjut hingga tahun 1986. Pada tanggal 14 April tahun 1986, Amerika Serikat melakukan penyerangan pada markas militer Libya.⁶⁶ Amerika Serikat melakukan

⁶³ Agung D.H. 2011. *Khadafi Anjing Gila dari Sahara*. Narasi. Yogyakarta. Hlm 33

⁶⁴ *Ibid.* Hlm 46

⁶⁵ Asep Syamsul M. Romli. 2000. *Demonologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*. Gema Insani Press. Jakarta. Hlm. 91

⁶⁶ Renne R. A. Kawilarang. 2011. *Kegilaan Kolonel Khadafi*. Diakses melalui <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/207834-kegilaan-kolonel-khadafi> [13 September 2015]

penyerangan terhadap Libya karena menganggap Gaddafi terlibat dalam aksi terorisme di wilayah Eropa.

Dua tahun berikutnya, Gaddafi juga diduga terlibat aksi terorisme di Skotlandia. Pada tanggal 21 Desember tahun 1988 Pesawat Pan Am yang berangkat dari bandara Heathrow, Inggris menuju New York, Amerika Serikat meledak di langit Lockerbie, Skotlandia. Peristiwa meledaknya pesawat Pan Am tersebut mengakibatkan penumpang dan awak, meninggal. Total korban yang meninggal sebanyak 270 orang. Aksi terorisme tersebut dikenal dengan peristiwa Lockerbie.⁶⁷

Tuduhan kepada Libya dalam kasus peledakan pesawat Pan Am di wilayah Lockerbie (Skotlandia) juga datang dari Inggris dan Prancis. Kedua negara tersebut berada satu barisan bersama Amerika Serikat menuduh Libya menyembunyikan dua warga Libya yang terlibat dalam peledakan pesawat Pan Am. Warga Libya yang diduga terlibat dalam aksi terorisme di Skotlandia itu adalah Abdel Baset Ali al-Megrahi dan al-Amin Khalifah Fhimah.⁶⁸ Tuduhan keterlibatan Gaddafi atas peristiwa Lockerbie juga diperkuat oleh pernyataan Mustafa Abdel Jalil seorang mantan menteri kehakiman Libya yang mengatakan bahwa Gaddafi terlibat dalam peristiwa peledakan pesawat Pan Am pada tahun 1988.⁶⁹

Selanjutnya setelah peristiwa peledakan pesawat Pan Am di Lockerbie, aksi-aksi terorisme yang terjadi di Amerika Serikat dan wilayah Eropa diidentikkan dengan keterlibatan Libya sebagai aktor teroris. Sehingga pada tahun 1988 Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi embargo perlengkapan penambangan minyak di Libya. Kemudian pada tahun 1989, Amerika Serikat memutuskan hubungan ekonomi secara total dengan Libya. Sanksi tersebut berlaku sampai Gaddafi bersedia menyerahkan pelaku-pelaku pengeboman Pan Am yang dikenal sebagai peristiwa Lockerbie.⁷⁰

⁶⁷ Elin Yunita Kristanti. 2014. *21-12-1988: Khadafi dan Misteri Ledakan Pesawat di Lockerbie*. Diakses melalui <http://news.liputan6.com/read/2148973/21-12-1988-khadafi-dan-misteri-ledakan-pesawat-di-lockerbie> [8 Februari 2016]

⁶⁸ Asep Syamsul M. Romli. 2000. *Op. Cit.* Hlm. 92

⁶⁹ Elin Yunita Kristanti. 2014. *Loc. Cit.*

⁷⁰ Agung D.H. 2011. *Op.Cit.* Hlm 35

Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2000-an hubungan Libya dengan negara-negara barat membaik. Pada bulan Oktober dan Desember 2003 Libya mulai membuka diri terhadap Barat terkait persenjataan yang dimiliki Libya. Gaddafi memperbolehkan pakar senjata dari Amerika Serikat dan Inggris untuk mengunjungi dan meninjau program senjata kimia di Libya.⁷¹ Hasil peninjauan intelejen Amerika Serikat dan Inggris, Libya memiliki 11 ton gas mustard, 500-900 ton bubuk uranium mentah, dan sekitar 30.000 rudal dengan berbagai jenis.⁷² Setelah dilakukannya peninjauan terhadap kepemilikan senjata kimia oleh pakar senjata dari Amerika Serikat dan Inggris, pada bulan Maret tahun 2004 Libya menyerahkan laporan atas kepemilikan senjata kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁷³

Sikap keterbukaan yang dilakukan oleh Gaddafi terhadap Barat atas kekuatan persenjataannya, menyebabkan membaiknya hubungan Libya dengan negara-negara Barat. Selain keterbukaan informasi senjata Libya terhadap Barat, pada tahun 2004 Gaddafi juga bersedia membayar ganti rugi uang dengan jumlah 2,7 milyar dollar Amerika Serikat kepada korban akibat meledaknya pesawat Pan Am milik Amerika Serikat pada tahun 1988. Sikap Gaddafi yang lunak terhadap Barat kemudian diikuti dengan kemurahan hati pihak Barat. Pada bulan September tahun 2004 Amerika Serikat dan Uni Eropa mencabut embargo penjualan senjata terhadap negara Libya.⁷⁴

Pada tahun 2006 presiden Amerika Serikat, George W. Bush, di dalam forum PBB secara resmi mengumumkan bahwa Libya tidak lagi masuk negara berbahaya.⁷⁵ Menindak lanjuti pernyataan George W. Bush, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengundang perwakilan Libya untuk bertemu di Washington DC. Hasil dari pertemuan tersebut adalah Amerika Serikat mencabut sanksi

⁷¹ Renne R.A Kawilarang. 2012. *19-12-2003: Libya Lucuti Senjata Pemusnah Massal*. Diakses melalui <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/376016-19-12-2003--libya-lucuti-senjata-pemusnah-massal> [8 Februari 2016]

⁷² Pepih Nugraha. 2011. *Khadafy Masih Simpan Senjata Kimia*. Diakses melalui <http://internasional.kompas.com/read/2011/08/24/0937278/Khadafy.Masih.Simpan.Senjata.Kimia>. [8 Februari 2016]

⁷³ Renne R.A Kawilarang. 2012. *Loc. Cit.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Renne R. A. Kawilarang. 2011. *Loc. Cit*

ekonomi yang telah diberlakukan sejak tahun 1980-an.⁷⁶ Pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan perwakilan negara Libya menandakan bahwa kedua negara saling membangun hubungan yang lebih baik.

Citra Libya terhadap Barat di bawah kepemimpinan Gaddafi dalam perkembangannya mengalami perubahan. Libya yang sejak tahun 1969 sampai tahun 1990-an dikenal sebagai negara pendukung teroris dan anti negara-negara Barat menjadi pro terhadap negara-negara Barat. Setelah presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Libya bukan negara teroris, negara-negara Barat lainnya seperti Itali dan Inggris lebih intens menjalin komunikasi dengan Libya. Pada tahun 2009 Gaddafi menghadiri undangan sidang Majelis Umum PBB di New York sebagai tamu kehormatan dan berpidato di dalam acara tersebut.⁷⁷

Perlakuan baik yang dilakukan oleh pihak Barat terhadap Libya menambah kepercayaan Gaddafi akan masa depan pembangunan negaranya. Besarnya kepercayaan Gaddafi terhadap pihak Barat ditunjukkan dengan penyerahan sisa senjata nuklir kepada Amerika Serikat pada tahun 2009. Senjata nuklir tersebut aktif dan telah siap untuk digunakan.⁷⁸

Hubungan politik yang telah membaik antara Libya dengan Barat sejak tahun 2000-an menjadi rusak pada tahun 2011. Revolusi rakyat yang terjadi di Libya mengundang pihak Barat untuk campur tangan dalam konflik yang terjadi antara pemerintah dan rakyat. Dalam upaya revolusi tersebut rakyat terorganisir dalam satu wadah yaitu *National Transitional Council* (NTC). Pihak Barat yang direpresentasikan oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) membantu NTC untuk menggulingkan kepemimpinan Gaddafi di Libya. Kekuatan persenjataan militer Libya yang lemah dimanfaatkan oleh pihak Barat untuk menyerang dan mengakhiri kepemimpinan Gaddafi.

⁷⁶ Priyambodo R.H. 2008. *Rice Jadi Tuan Rumah Kunjungan Bersejarah Menlu Libya*. Diakses melalui <http://www.antarane.ws.com/berita/88947/rice-jadi-tuan-rumah-kunjungan-bersejarah-menlu-libya> [8 Februari 2016]

⁷⁷ Renne R. A. Kawilarang. 2011. *Loc. Cit*

⁷⁸ Pepih Nugraha. 2011. *Loc.Cit*.

2.5 Represi Rezim Gaddafi terhadap Partisipasi Politik Rakyat Libya

Saat rezim Gaddafi berkuasa kebebasan masyarakat Libya untuk berorganisasi dan berpendapat sangat terbatas. Keterbatasan tersebut dirasakan setelah pemerintahan Gaddafi mengesahkan Undang-undang nomor 71 tahun 1972, tentang pelarangan keberadaan partai politik di Libya.⁷⁹ Undang-undang nomor 71 tahun 1972 juga menjadi dasar bagi pemerintah Libya pada era Gaddafi untuk melarang semua bentuk demonstrasi. Gerakan demonstrasi dianggap menghina konstitusi negara Libya.⁸⁰ Atas dasar undang-undang tersebut partai politik dan segala bentuk demonstrasi dilarang. Keberadaan partai politik dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap keutuhan negara. Adanya partai politik akan memperuncing perbedaan dan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan di Libya.

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya undang-undang tersebut maka adalah sah bagi negara untuk menindak secara tegas bagi warga yang berupaya mendirikan organisasi, partai politik atau kelompok yang bersuara melawan Gaddafi. Upaya tersebut dinilai sebagai ancaman bagi negara Libya. Meskipun sejatinya adalah ancaman bagi kekuasaan Gaddafi. Negara berhak melakukan penangkapan terhadap kelompok-kelompok atau individu-individu terkait dengan pelanggaran undang-undang tersebut serta berhak memproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Libya.

Pada tahun 1976 terjadi aksi protes oleh mahasiswa Universitas Benghazi terhadap kebijakan Gaddafi yang dianggap terlalu mengintervensi bidang akademik. Setelah kejadian aksi protes tersebut empat mahasiswa dari Universitas Benghazi ditemukan dalam keadaan tewas. Diduga keempat mahasiswa tersebut menjadi korban pembunuhan oleh tentara Gaddafi.⁸¹ Pada tahun 1996 pemerintah Libya dibawah kepemimpinan Gaddafi pernah menahan 1200 orang dan di tempatkan di penjara Abu Salim. Mereka ditahan karena

⁷⁹ Countrydata.com.2010. *Loc. Cit.*

⁸⁰ Apriadi Tamburaka. 2011. *Op. Cit.* Hlm. 219

⁸¹ Mohamed Eljahmi. 2009. *Don't Let My Brother's Death Be In Vain*. Diakses melalui <http://www.forbes.com/2009/06/15/fathi-eljahmi-libya-opinions-contributors-human-rights.html> [24 Februari 2015]

terlibat aksi protes terhadap pemerintahan Gaddafi. Penahanan terhadap 1200 orang tersebut dilakukan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan.⁸² Pada tahun 2002 Fathi Eljahmi seorang aktivis yang semangat menyuarakan demokrasi di Libya ditangkap dan dipenjarakan oleh militer Libya. Penangkapan dan penahanan oleh militer Libya dilakukan atas perintah Gaddafi. Selama masa tahanan, Fathi Eljahmi mendapat perlakuan sewenang-wenang oleh aparat keamanan Libya. Sehingga pada tahun 2009 Fathi Eljahmi tewas di dalam penjara Abu Salim, Libya. Dalam tahun yang sama sebanyak 86 aktivis mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan oleh aparat keamanan Libya. Penahanan dilakukan karena 86 aktivis mahasiswa tersebut diduga terlibat dalam sebuah kegiatan organisasi Islam yang bersifat politik di Libya.⁸³

Awal tahun 2011 Federasi Internasional untuk Hak Asasi atau *International Federation of Human Rights* yang berkantor di Paris, mencatat 275 orang menjadi korban kekerasan pemerintahan Libya. Pendekatan represif oleh Gaddafi tidak hanya dilakukan terhadap warga sipil. Pemerintahan Gaddafi juga tidak segan membunuh anggota militer yang membelot dari pemerintahannya. Tercatat sebanyak 48 prajurit Libya dibunuh oleh militer Libya.⁸⁴ Pada bulan Februari tahun 2011 seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) bernama Fathi Terbil ditangkap oleh aparat keamanan kota Benghazi. Fathi Terbil ditangkap ketika melakukan aksi demonstrasi di kota Benghazi. Dalam aksinya Fathi Terbil melakukan upaya pembelaan terhadap para korban yang tewas di penjara Abu Salim tahun 1996 yang lalu.⁸⁵ Upaya demonstrasi yang dilakukan oleh Fathi Terbil dianggap bentuk perlawanan terhadap negara oleh Gaddafi.

Semasa pemerintahan Gaddafi di Libya, kebebasan pers juga menjadi terbatas. Menurut pemikiran Gaddafi yang tertuang didalam *The Green Book*, pers yang selama ini ada hanya menggiring opini dalam ketidakbenaran. Namun di sisi lain Gaddafi mengakui peran pers sangat penting dalam negara demokrasi.

⁸² Yuldi Adiwiyata. 2011. *Loc.Cit.*

⁸³ Mohamed Eljahmi. 2009. *Loc.Cit.*

⁸⁴ Renata Permadi. 2011. *Dunia Kutuk Regim Khadafi*. Diakses melalui <http://www.dw.de/dunia-kutuk-regim-khadafi/a-14870739> [23 Februari 2015]

⁸⁵ Matthias V. Hellfeld. 2011. *Loc.Cit.*

Gaddafi menambahkan bahwa keberadaan pers dapat mendukung dan menumbangkan pemerintahan. Menurut Gaddafi, menjadi bahaya apabila pers dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Surat kabar yang dimiliki perorangan hanya akan mengungkapkan persoalan menurut pandangan satu atau sekelompok orang yang kemudian dijadikan konsumsi publik. Oleh karena itu, setiap media komunikasi dan informasi harus dikendalikan dan dioperasikan oleh komite yang mewakili rakyat (dalam hal ini berarti dikendalikan oleh pemerintah).⁸⁶

Pemerintahan Gaddafi menjadi pemerintahan yang tertutup. Upaya rakyat Libya untuk mengakses informasi didalam pemerintahan menjadi sulit. Selain itu pemerintahan Gaddafi dalam merespon bentuk aksi kritis dari rakyat sering kali menggunakan pendekatan represif. Sehingga dalam perkembangan kepemimpinannya di Libya, rakyat yang semula mencintai Gaddafi menjadi benci terhadap gaya kepemimpinannya. Penangkapan dan pembunuhan terhadap aktivis pro demokrasi oleh aparat keamanan Libya menjadi cara Gaddafi untuk menciptakan kondisi politik dan pemerintahan Libya yang stabil.

2.6 Despotisme Kepemimpinan Muammar Gaddafi

Sejak Gaddafi menjadi pemimpin Libya pada tahun 1969, Gaddafi merubah sistem politik monarki dengan demokrasi langsung. Sistem demokrasi langsung di Libya berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Sistem demokrasi langsung dalam prakteknya di Libya, tidak menggunakan mekanisme pemilihan umum untuk anggota perwakilan rakyat atau presiden.⁸⁷ Perekrutan jabatan politik pada pemerintahan sektor Jamahiriya dilakukan melalui kongres rakyat. Dimana kongres tersebut diselenggarakan disetiap kota Libya yang diikuti oleh setiap warga Libya yang telah berumur 19 tahun. Sedangkan pada sektor Revolusiner perekrutan pejabat politik merupakan sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan

⁸⁶ Zakiyuddin Baidhawy. 2000. *Menapak Jalan Revolusi*. Insist Press. Yogyakarta. Hlm. 44-45

⁸⁷ Tulisan Henry B. Mayo dalam buku *An Introduction to Democratic Theory* yang di kutip oleh Miriam Budiardjo dalam buku *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menyebutkan bahwa, "Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm 117

Komando Revolusi. Posisi Dewan Komando Revolusi adalah sebagai pembimbing Revolusi. Apabila ada penyimpangan dari tujuan Revolusi 1969, maka Dewan Komando Revolusi berwenang member keputusan.

Gaddafi membangun sistem politik di Libya sesuai dengan pemikirannya sendiri tentang demokrasi. Sistem demokrasi yang dibangun oleh Gaddafi membentuk sistem yang menjadikan dirinya memiliki posisi yang kokoh didalam pemerintahan. Sejak awal Gaddafi berkuasa pada tahun 1969 sampai pada tahun 2011, Gaddafi menjadi ketua Dewan Komando Revolusi Libya. Dimana keberadaan Dewan Komando Revolusi merupakan institusi yang memiliki kewenangan tanpa batas. Selain itu, Dewan Komando Revolusi juga memiliki otoritas politik tertinggi di Libya. Setiap kebijakan yang dibuat harus mendapat persetujuan dari Dewan Komando Revolusi dan dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah sektor Jamahiriya dalam hal ini Komite Rakyat diawasi oleh Komite Revolusi (institusi yang berdiri dibawah pemerintah sektor Revolusioner).

Gaddafi sebagai ketua Dewan Komando Revolusi juga memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan pejabat tinggi negara. Kewenangan tersebut yang digunakan Gaddafi untuk memilih orang-orang yang loyal terhadap Gaddafi untuk mempertahankan kekuasaannya hingga 42 tahun. Selama berkuasa di Libya, Gaddafi menggunakan tiga instrument untuk mempertahankan kekuasaannya di dalam pemerintahan Libya. Ketiga instrument yang digunakan meliputi, keluarganya, loyalisnya dan kekayaan yang dimilikinya.⁸⁸

Kewenangan yang dimiliki oleh Gaddafi, dalam prakteknya digunakan untuk menempatkan keluarga dan loyalisnya pada posisi penting dalam pemerintahan Libya. Putra Gaddafi bernama Muhammad (putra dari istri pertamanya, Fatiha) direkrut menjadi kepala Komite Olimpiade Libya. Dari istri kedua bernama Safia Gaddafi merekrut putranya sendiri bernama Khamis Gaddafi untuk mengisi jabatan Kepala Angkatan Darat Libya. Khamis Gaddafi menjadi

⁸⁸Dan Lieberman. 2010. *Muammar Al Gaddafi Meets His Own Rebels*. Di akses dari <http://www.opednews.com/articles/Muammar-Al-Gaddafi-Meets-h-by-Dan-Lieberman-110314-522.html> [20 Februari 2015]

pemimpin Angkatan Darat Libya dengan membawahi 50.000 prajurit. Diantara 50.000 prajurit sebanyak 10.000 prajurit diberikan pelatihan militer secara khusus dan dipersenjatai dengan lengkap.⁸⁹ Putra keempat Gaddafi bernama Mutassim Billah direkrut untuk menjabat sebagai kepala Dewan Keamanan Nasional Libya atau *National Security Commission* (NSC). Dewan Keamanan Nasional bertugas sebagai penasihat Gaddafi (sebagai kepala negara) untuk sektor keamanan di Libya. Putra kedua Gaddafi bernama Saif al-Islam direkrut untuk menjabat sebagai juru bicara Internasional Libya oleh Gaddafi.⁹⁰

Pada era kepemimpinan Gaddafi di Libya, juga terdapat satu kelompok pendukung Gaddafi yang keberadaannya mendominasi kelompok lainnya. Kelompok tersebut adalah Brigade 32 yang terdiri dari milisi dari berbagai kota seperti Sirte, Tripoli dan Benghazi yang loyal terhadap kepemimpinan Gaddafi di Libya. Dalam konflik internal Gaddafi tidak menggantungkan nasib pada angkatan bersenjata negara Libya melainkan meminta dukungan pada Brigade 32. Anggota pasukan Brigade 32 dilatih secara khusus di Rusia dan dipimpin langsung oleh Khamis, putra kelima Gaddafi. Brigade 32 meski bukan militer resmi negara Libya, memiliki persenjataan lebih canggih dari angkatan bersenjata Libya.⁹¹ Khamis Gaddafi selain menjabat sebagai kepala Angkatan Darat Libya, dia juga membangun kekuatan militer di luar struktur pemerintahan Libya.

Kekuatan Gaddafi di Libya yang terbesar datang dari keluarga dan suku Gaddadfa yang berasal dari kota Sirte. Gaddafi lebih banyak menunjuk tokoh-tokoh yang berasal dari suku Gaddadfa untuk menduduki posisi-posisi penting di Libya. Seperti menunjuk Brigjen Abdullah Sanusi saudara tiri Gaddafi yang berasal dari suku Gaddadfa untuk menjadi pemimpin pasukan penjaga keamanan Libya.⁹²

⁸⁹ International Center. 2011. *Loc. Cit.*

⁹⁰ Varun Vira, Anthony H. Cordesman, A. Burke. 2011. *The Libya Uprising: An Uncertain Trajectory*. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Washington DC. Hlm 21

⁹¹ Frank Gardner. 2011. *Siapa Penyokong Rezim Gaddafi?*. Diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/03/110304_penyangga_gaddafi.shtml [7 September 2015]

⁹² *Ibid.*

Keberadaan keluarga dan orang-orang yang loyal terhadap kepemimpinan Gaddafi di dalam lingkaran kekuasaan menimbulkan penilaian negatif oleh rakyat Libya. Terlebih keluarga Gaddafi juga dinilai oleh rakyat Libya memiliki gaya hidup yang mewah. Kemewahan tersebut terlihat dari kekayaan dan asset-aset yang seluruhnya merupakan hasil dari Gaddafi selama 42 tahun berkuasa di Libya. Kekayaan Gaddafi dan keluarganya mencapai lebih dari 600 triliun yang tersebar di Libya, Prancis, Inggris, Itali dan Amerika Serikat. Seluruh asset kekayaan keluarga Gaddafi bersumber dari pendapatan negara Libya terutama pada sektor minyak. Sejak Gaddafi berkuasa di Libya, Gaddafi memonopoli perusahaan minyak Libya. Selain itu, penempatan keluarga pada posisi pejabat negara juga merupakan faktor kokohnya kekuasaan Gaddafi di Libya.⁹³ Keberadaan keluarga Gaddafi di dalam lingkaran kekuasaan mempermudah akses Gaddafi untuk menguasai perekonomian melalui badan usaha milik negara Libya. Pada tahun 1974 sebanyak 60% perusahaan minyak Libya dibawah kontrol pemerintah Libya mulai dari kegiatan eksplorasi, produksi, hingga proses distribusinya.⁹⁴

Penempatan keluarga dan loyalis Gaddafi di dalam pemerintahan Libya, berdampak pada pembangunan di Libya. Kebanyakan pembangunan di Libya dilakukan di wilayah-wilayah dimana para keluarga dan para loyalis Gaddafi tinggal. Akibatnya, distribusi pembangunan di Libya pada era kepemimpinan Gaddafi tidak merata. Seperti pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah layak huni yang di berlakukan oleh Gaddafi. Dari daftar sebanyak 180.000 warga Libya yang membutuhkan rumah layak huni, pemerintah Libya menyediakan program pembangunan rumah layak huni sebanyak 150.000 rumah. Namun dalam realisasinya rumah yang dibangun hanya sekitar 100.000 rumah. Pembangunan tersebut dilakukan di wilayah Sirte, Tripoli dan tempat dimana suku Warfala, Gadaddfa dan al-Maghariha itu tinggal.⁹⁵ Pembangunan fisik Libya

⁹³ Afred Suci. 2011. *Op. Cit.* Hlm. 121

⁹⁴ Agung D.H. 2011. *Khadafi Anjing Gila dari Sahara*. Narasi. Yogyakarta. Hlm. 28

⁹⁵ Alexandra Valiente. 2011. *Celebrating The Great Achievements of Muammar Gaddafi*. Diakses melalui <https://libyadiary.wordpress.com/2011/11/09/celebrating-the-great-acheivments-of-muammar-gaddafi/> (12 September 2015)

banyak dilakukan di kota-kota besar Libya saja. Proyek pembangunan rumah layak huni, apartemen bertingkat, saluran listrik, dan saluran air tampak modern di wilayah kota Benghazi dan Tripoli. Pada dua kota tersebut juga dibangun gedung-gedung pencakar langit.⁹⁶

Selama empat dekade kepemimpinan Gaddafi, Libya menjadi negara yang otoriter. Sistem politik dan pemerintahan Libya menjadi tertutup, kekuasaan terpusat dan partisipasi rakyat Libya terkekang. Selain itu pembangunan ekonomi di Libya juga tidak merata dimana pembangunan infrastruktur kebanyakan hanya dilakukan di daerah-daerah tempat loyalis Gaddafi berasal, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi di Libya. Kondisi tersebut menimbulkan rasa kebencian oleh rakyat Libya terhadap pemerintahan Gaddafi. Puncaknya pada bulan Januari tahun 2011 terjadi gerakan massa oleh rakyat Libya menuntut Gaddafi meletakkan kekuasaannya.

⁹⁶ *Ibid.*

BAB 3. UPAYA NATIONAL TRANSITION COUNCIL (NTC) DAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM PENGGULINGAN KEPEMIMPINAN MUAMMAR GADDAFI

3.1 Perlawanan Rakyat Libya Terhadap Rezim Otoritarian Muammar Gaddafi

Sejak Gaddafi menjadi pemimpin Libya, banyak kelompok-kelompok oposisi yang berdiri melawan kepemimpinan Gaddafi di Libya. Munculnya kelompok-kelompok oposisi tersebut disebabkan oleh gaya kepemimpinan Gaddafi yang otoriter. Gaddafi seringkali memaksakan kehendaknya sebagai pemimpin Libya untuk dipatuhi oleh rakyat. Seperti doktrin tentang ide demokrasi yang tertuang dalam *The Green Book* (Buku Hijau) dimana rakyat harus memahami dan melaksanakan demokrasi sesuai dengan ide Gaddafi yang tertuang dalam Buku Hijau tersebut. Selain itu Gaddafi juga sering melakukan tindakan represif terhadap rakyat dan kelompok-kelompok yang bersikap kritis terhadap pemerintahannya. Gaya kepemimpinannya yang otoriter perlahan memancing kebencian dari rakyat Libya. Rakyat yang mulai tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Gaddafi kemudian tergabung dalam kelompok-kelompok penentang rezim Gaddafi di Libya.

Perubahan-perubahan sistem politik di Libya yang dilakukan oleh Gaddafi pada kenyataannya tidak dapat diterima oleh sebagian rakyat Libya. Pada tahun 1970-an kelompok-kelompok pejuang demokrasi di Libya mulai bermunculan meskipun keberadaannya tidak begitu mencolok. Diawali dengan munculnya kelompok pendukung rezim Raja Idris yang berbasis di Fezzan. Kelompok tersebut terdiri dari keluarga Raja Idris dan suku dimana keluarga Raja Idris dibesarkan. Kelompok oposisi yang lain muncul dari para pemimpin suku yang masih mempertahankan sikap konservatisme adat mereka. Kelompok-

kelompok oposisi tersebut menolak untuk menjadi bagian dari perubahan revolusioner Libya yang di komandoi oleh Gaddafi.⁹¹

Kelompok-kelompok yang menentang rezim Gaddafi perlahan semakin mengkristal menjadi organisasi-organisasi opositif terhadap pemerintah Libya dibawah kepemimpinan Gaddafi. Organisasi-organisasi oposisi terhadap pemerintahan Gaddafi tumbuh diluar negara Libya. Sejak pemerintahan Gaddafi mengeluarkan kebijakan pelarangan organisasi oposisi dan partai politik berdiri di Libya, kelompok-kelompok oposisi mulai mengembangkan organisasinya diluar negeri.

Organisasi oposisi yang pertama kali muncul berasal dari kalangan mahasiswa Libya yang sedang belajar di luar negeri. Kemunculan Organisasi tersebut disebabkan oleh dijatuhinya hukuman mati terhadap tiga mahasiswa Libya yang menentang rezim Gaddafi pada tahun 1976. Mereka mendirikan Organisasi Persatuan Umum Mahasiswa Libya atau *The General Union of Libyan Students* (GULS). Organisasi tersebut berdiri pada tahun 1976. Anggota organisasi GULS mahasiswa Libya yang belajar di luar negeri. Mahasiswa Libya tersebut tersebar di berbagai negara, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Itali, Maroko dan Mesir. Sejak tahun 1981 mulai diadakan kongres untuk memilih kepengurusan dan membahas strategi untuk mewujudkan demokrasi bagi negara Libya. Hasil dari kongres yang diadakan dalam setahun sekali kemudian dipublikasikan melalui media cetak *Shuhada Ibril*.⁹²

Organisasi oposisi yang berada di luar negeri diantaranya adalah *Libian National Salvation Front* (LNSF) yang berdiri pada tahun 1981. Organisasi LNSF di pimpin oleh Muhammad Yusuf al-Magariaf yang merupakan mantan duta besar Libya untuk India.⁹³ Organisasi LNSF berada di negara Sudan sampai pada tahun 1985 saat Sudan Masih berada di bawah kepemimpinan Numayri. Fokus gerakan LNSF adalah menyerukan demokratisasi, menolak rezim

⁹¹ The Library of Congress. 2011. *Libya Opposition to Qadhafi*. Diakses melalui <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field%28DOCid+ly0110%29> [20 September 2015]

⁹² Haim Shaked and Daniel Dishon. 1987. *Middle East Contemporary Survey*. Westview Press. Colorado. Vol. 8. Hlm 583

⁹³ Nurani Soyomukti dan Muhammad Iqbal. 2011. *Op. Cit.* Hlm. 155

pemrintahan militer dan diktator, kebebasan berorganisasi, kebebasan pers dan diberlakukannya pemisahan antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁹⁴

Organisasi oposisi lain yang berbasis di luar negeri adalah Organisasi Pembebasan Libya atau *Libyan Liberation Organization* (LLO). Organisasi tersebut terbentuk pada tahun 1982 dan berbasis di Kairo. Sejak tahun 1987 organisasi oposisi LLO dipimpin oleh Abdul Hamid Bakkush, seorang mantan perdana menteri pada era pemerintahan Raja Idris di Libya.⁹⁵ Pada tahun 1998 organisasi oposisi LLO pernah menjalin kerjasama dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Pesisir Mediterania.⁹⁶

Al-Burkan merupakan organisasi muslim syiah yang berada dibawah kepemimpinan Brigade Musa Sadr. Organisasi oposisi Al-Burkan berdiri pada tahun 1984. Anggota organisasi Al-Burkan pernah melukai seorang Duta Besar Libya yang bertugas di Madrid, Spanyol.⁹⁷ Selain itu organisasni oposisi Al-Burkan juga pernah mengklaim pernah membunuh duta besar Libya di Roma. Pada tanggal 21 Juni 1984 seorang pengusaha yang memiliki kedekatan erat dengan Gaddafi tewas ditembak anggota organisasi Al-Burkan di Athena. Pengusaha tersebut ditembak mati ketika sedang berlangsungnya kunjungan sekretaris luar negeri Libya, Abdul Salam Turayki ke Athena. Pada tahun 1985, anggota organisasi Al-Burkan juga terlibat dalam pembunuhan kepala Biro Informasi Libya di Roma.⁹⁸

Kemunculan organisasi oposisi yang berbasis di luar negeri merupakan ancaman bagi pemerintahan Gaddafi di Libya. Organisasi oposisi tersebut telah banyak melakukan tindakan yang menentang rezim otoriter dibawah kepemimpinan Gaddafi. Penentangan oleh organisasi-organisasi oposisi tersebut terlihat dalam keberaniannya untuk membunuh orang-orang yang loyal terhadap

⁹⁴ Country-data.com. 2011. *Libya Exiled Opposition*. Diakses melalui <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-8220.html> [20 September 2015]

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Refworld. 2001. *Libya: Libyan Liberation Organization (LLO)*. Diakses melalui <http://www.refworld.org/docid/3df4be5f18.html> [20 September 2015]

⁹⁷ John E Jessup. 1998. *An Encyclopedic Dictionary of Conflict and Conflict Resolution 1945-1996*. Rehabilitation Institute of Chicago. Greenwood. Hlm. 14

⁹⁸ Nurani Soyomukti dan Muhammad Iqbal. 2011. *Op. Cit.* Hlm. 155

pembunuhan terhadap pengusaha Libya oleh anggota organisasi oposisi Al-Burkan. Duta besar dan pengusaha yang dibunuh merupakan kawan dekat Gaddafi yang selalu mendukung pemerintahan Libya dibawah kepemimpinan Gaddafi.

Bentuk-bentuk perlawanan oleh kelompok-kelompok oposisi Libya baru menemukan kesepakatan untuk penggulingan terhadap rezim otoriter Gaddafi pada tahun 1987. Kelompok-kelompok oposisi baik yang berada di luar dan di dalam negeri bertemu untuk melakukan koordinasi perlawanan terhadap rezim Gaddafi. Pertemuan tersebut dipimpin oleh mantan anggota Dewan Komando Revolusi Libya, Mayor Huni al-Abd Munim. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh pemimpin-pemimpin kelompok oposisi dan juga dari kalangan mahasiswa. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa upaya penggulingan rezim Gaddafi perlu dilaksanakan secara terus menerus.⁹⁹

Terdapat pula kelompok keagamaan tradisional yang berada di dalam negeri Libya seperti Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini memiliki tujuan menumbuhkan ajaran asli Al Quran sehingga dalam gerakannya selalu menyerukan anti skularisme yang menguasai negara-negara Islam. Salah satu aktivis muda Ikhwanul Muslimin yang terkenal berani bersikap kritis terhadap rezim Gaddafi yaitu Mohammed Sawan. Sikap kritis dari anggota Ikhwanul Muslimin tersebut berujung penahanan oleh pemerintah Libya di bawah kepemimpinan Gaddafi.¹⁰⁰ Kelompok keagamaan lain diantaranya adalah Salafi dan Jihadis. Kelompok Salafi dalam gerakannya dikenal lunak. Kelompok tersebut lebih memilih melakukan penyebaran ajaran agamanya melalui dakwah dari masjid ke masjid. Sedangkan kelompok Jihadis merupakan kelompok yang memiliki senjata sehingga tidak jarang melakukan pemberontakan melawan rezim Muammar Gaddafi. Dalam perlawanannya kelompok Jihadis seringkali mengalami kegagalan. Kelompok Jihadis melakukan aktivitas kesehariannya

⁹⁹ Country-data.com. 2011. *Loc. Cit.*

¹⁰⁰ Country-data.com. 1987. *Libya Religious Opposition*. Diakses melalui <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-8219.html> [20 September 2015]

secara sembunyi-sembunyi. Sehingga dalam setiap aksi pemberontakan tidak dapat di prediksi oleh pemerintah Libya.¹⁰¹

Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok oposisi rezim Gaddafi di Libya menemukan momentum untuk melakukan aksi penggulingan terhadap Gaddafi. Pada awal tahun 2011 aksi gerakan massa dengan menyerukan demokratisasi di wilayah Timur Tengah dan Afrika mulai bermunculan. Dimulai dari Tunisia yang terjadi di akhir bulan Desember 2010 dan menyebar secara massif ke Mesir, dan Libya. Peristiwa Revolusi sporadik tersebut dikenal dengan nama Revolusi Melati atau *Jasmine Revolution*.¹⁰² Revolusi yang terjadi pada negara tetangga Libya, mendorong rakyat Libya untuk melakukan aksi massa. Aksi massa yang dilakukan bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan rezim otoriter Gaddafi dan segera mewujudkan demokrasi di Libya.

3.2 Peran *National Transitional Council* (NTC) dalam Penggulingan Rezim Muammar Gaddafi

3.2.1 Terbentuknya *National Transitional Council* (NTC)

Menanggapi aksi gerakan massa yang terjadi di Libya, pihak oposisi kemudian segera mengadakan pertemuan. Pada tanggal 24 Februari 2011 Mustafa Abdel Jalil seorang mantan menteri kehakiman di era Gaddafi memimpin pertemuan yang bertempat di kota Bayda. Pertemuan di kota Bayda tersebut diikuti oleh 31 perwakilan dari masing-masing daerah Libya. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para politisi, mantan perwira militer, pemimpin suku, akademisi dan beberapa kalangan pengusaha yang ada di Libya. Pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak oposisi di kota Bayda bertujuan mencari solusi dari krisis politik yang sedang terjadi di Libya. Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah keinginan para delegasi untuk adanya intervensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁰³

¹⁰¹ Michael Klimes. 2011. *Post-Gaddafi Era Libya's Diverse Islamist Seek Political Role*. Diakses melalui <http://www.quilliamfoundation.org/press/global-arab-network-article-post-gaddafi-era-libyas-diverse-islamists-see-political-role/> [20 September 2015]

¹⁰² Apriadi Tamburaka. 2011. *Op.Cit.* Hlm. 9

¹⁰³ *Ibid.* Hlm. 237

Sesuai kesepakatan dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak oposisi pada tanggal 24 Februari 2011 di kota Bayda, maka *National Transitional Council* (NTC) dibentuk pada tanggal 27 Februari 2011. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2011 NTC mendeklarasikan diri secara resmi sebagai pemerintah yang sah di Libya. NTC dipimpin oleh Mustafa Abdel Jalil. Wakil ketua NTC dijabat oleh Abdul Hafiz Ghoza. Selain itu, Abdul Hafiz Ghoza merangkap jabatan sebagai juru bicara pemimpin Libya versi pemerintahan NTC.¹⁰⁴ Anggota dewan NTC berjumlah 31, diantaranya adalah Zubeir Ahmad el Sharif seorang tahanan politik pemerintahan Gaddafi yang berhasil dibebaskan, Omar Al Hariri perwakilan dari militer dan Dr. Fatih Muhammad Baja perwakilan dari kota Benghazi, Dr. Salwa Fawzi el Deghili seorang pakar hukum yang berasal dari kota Benghazi.¹⁰⁵ Sesuai tujuan dibentuknya NTC maka anggota NTC bertugas mengorganisir aksi pembebasan Libya dari rezim Gaddafi dan mengawal masa transisi Libya sampai pada pemerintahan baru Libya terpilih.

Tujuan NTC seperti yang telah disampaikan oleh Mustafa Abdel Jalil adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- a. Menjamin keamanan wilayah teritorial Libya
- b. Mengorganisir gerakan untuk membebaskan Libya dari kekuasaan Gaddafi
- c. Mendukung upaya dewan lokal untuk mengembalikan kehidupan warga dalam keadaan normal seperti sebelum konflik
- d. Melakukan pengawasan terhadap majelis konstituante dalam melaksanakan tugasnya
- e. Menyusun draft konstitusi baru
- f. Mewakili pemberontakan sejak bulan Februari
- g. Membuat sub-komite untuk mempermudah menangani masalah yang dihadapi rakyat Libya selama masa transisi.

¹⁰⁴ Temehu.com. 2011. *Formation of NTC*. Diakses melalui <https://www.temehu.com/ntc.htm> [17 Maret 2015]

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Sejak kelompok oposisi membentuk *National Transitional Council* (NTC), Libya memiliki dualisme pemerintahan. Pertama adalah pemerintahan Libya dibawah kepemimpinan Gaddafi. Kedua adalah pemerintahan yang dibentuk oleh kelompok oposisi (NTC). Dualisme pemerintahan di Libya berjalan selama beberapa bulan. Setelah kekuasaan Gaddafi berhasil dilengserkan, maka secara resmi NTC menjadi pemerintah sementara Libya sampai pemerintahan yang baru dibentuk melalui proses pemilihan umum pada bulan Juli 2012.

3.2.2 Pembebasan Libya dari Kekusaan Muammar Gaddafi

Aksi gerakan massa dalam upaya pembebasan Libya dari kekuasaan Gaddafi berlangsung kurang lebih selama delapan bulan. Semangat rakyat Libya untuk menjadikan negaranya demokratis tidak dapat dibendung. Upaya penggulingan Muammar Gaddafi oleh rakyat Libya dalam aksinya direpresentasikan oleh *National Transitional Council* (NTC). Sejak bulan Februari aksi demonstrasi oleh rakyat Libya menyebar keseluruh penjuru kota-kota Libya. Aksi demonstrasi oleh rakyat Libya berubah menjadi konflik ketika pemerintah Gaddafi merespon para demonstran menggunakan cara kekerasan. Cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Gaddafi tidak membuat rakyat Libya mundur. Aksi gerakan masa di Libya semakin meluas. Masyarakat Libya terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu yang anti pemerintahan Gaddafi dan kubu yang pro terhadap Gaddafi. Perpecahan yang terjadi di Libya menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindari.

Konflik di Libya awalnya terjadi antara para demonstran dengan pemerintahan Gaddafi. Rakyat Libya yang melakukan aksi demonstrasi mendapat perlakuan kekerasan oleh aparat keamanan Libya. Rasa kekecewaan terhadap kepemimpinan Gaddafi di Libya semakin hari semakin bertambah. Para demonstran tersebut semakin gencar melakukan perlawanan terhadap aparat keamanan Libya. Namun dalam aksi perlawanan tersebut rakyat Libya tidak mampu menghadapi aparat keamanan dengan persenjataan lengkap. Ketidakmampuan para demonstran melawan aparat Libya yang dilengkapi dengan senjata, membuat pihak oposisi terdorong mendirikan semacam organisasi untuk melawan Gaddafi. Kemudian untuk mengkoordinir aksi gerakan masa tersebut para elit di

tubuh kelompok oposisi bersepakat mendirikan *National Transitional Council* (NTC). Individu dan kelompok – kelompok kepentingan yang memiliki tujuan untuk pembebasan Libya dari rezim Gaddafi ikut bergabung di dalam NTC. Kelompok – kelompok kepentingan yang bergabung adalah:¹⁰⁷

1. *The Libyan League for Human Rights*
2. *The National Front to Save Libya*
3. *The Sanusian Monarchists*
4. *The Liberals close to Saif al-Islam*
5. Orang-orang yang menentang Gaddafi dan pengikutnya
6. Militan Islam radikal

Individu-individu dan kelompok-kelompok yang tergabung dalam *National Transitional Council* (NTC) bersama-sama melakukan perlawanan terhadap pihak Gaddafi.

Keterbatasan jumlah pasukan militer pemerintah Libya untuk menghadapi para pemberontak menjadi penyebab bagi Gaddafi untuk menggunakan tentara bayaran (*mercenaries*). Tentara bayaran yang telah direkrut Gaddafi kebanyakan berasal dari Chad, Afrika. Persenjataan yang lengkap diberikan oleh pemerintahan Gaddafi kepada *mercenaries*. Para tentara bayaran dilengkapi dengan senjata untuk menghadapi pemberontak yang melawan pemerintahan Gaddafi.¹⁰⁸ Tentara bayaran yang didatangkan dari Chad, Afrika, menurut Gaddafi diperlukan untuk menambah kekuatan dan melindungi pemerintahannya dari perlawanan pihak oposisi yang dalam pergerakannya dimotori oleh NTC.

Selain menggunakan tentara bayaran, Gaddafi juga memiliki pasukan paramiliter yaitu kelompok militan lokal yang berasal dari suku-suku di Libya yang mendukung Gaddafi. Sejak Gaddafi berkuasa di Libya, pemerintahannya telah merekrut sekitar 300.000 orang untuk menjadi pasukan Paramiliter. Pasukan Paramiliter dipersiapkan untuk menjaga kedaulatan wilayah Libya dan juga bertugas untuk menjaga Gaddafi dari ancaman pemberontak Libya. Saat

¹⁰⁷ CF2R.org. 2011. *Loc. Cit*

¹⁰⁸ Apriadi Tamburaka. *Op. Cit.* Hlm 221

menjalankan tugasnya, pasukan Paramiliter Libya dilengkapi dengan kendaraan tempur ZSU-234, Tank T-52/55/56 dan penembak roket SA-8.¹⁰⁹

Aksi brutal para demonstran sejak bulan Februari 2011 membuat pemerintah Gaddafi semakin represif menghadapi demonstran. Konflik antara kedua pihak semakin memanas ketika para demonstran berhasil memanfaatkan kelengahan pasukan Gaddafi. Para demonstran merampas sebagian senjata milik aparat keamanan pemerintah Gaddafi di kota-kota Libya. Awal bulan Maret 2011 pasukan Gaddafi terlibat pertempuran di kota Mesra Brega. Pasukan Gaddafi berusaha mempertahankan pelabuhan minyak yang ingin dikuasai oleh pemberontak. Pada tanggal 17 Maret 2011 lima negara yang tergabung dalam koalisi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yaitu, Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris dan Kanada berusaha melumpuhkan kekuatan militer Gaddafi di kota Benghazi. Pesawat tempur milik Prancis menembak empat tank milik militer Gaddafi. Pada hari yang sama militer Amerika Serikat dan Inggris menyerang sistem pertahanan udara di wilayah pesisir utara.¹¹⁰

Pada bulan September 2011 konflik di Libya belum dapat teratasi. Giliran para pejuang-pejuang *National Transitional Council* (NTC) melancarkan serangan di kota Sirte. Aparat keamanan dari pemerintahan Gaddafi merespon serangan tersebut dengan tembakan roket dan artileri.¹¹¹ Awal Oktober 2011, pemberontak Libya menyerang kota Sirte. Penyerangan ini melibatkan sekitar 800 orang yang dikoordinir oleh NTC. Pemberontak saling serang dengan pasukan Gaddafi. Tembakan dengan roket, mortir dan tank dilancarkan oleh kedua pihak. Konflik tersebut mengakibatkan 12 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Mustafa Abdel Jalil selaku pemimpin NTC menyatakan pentingnya penguasaan kota Sirte oleh NTC sebab Sirte merupakan kota kelahiran Gaddafi.¹¹² Kota

¹⁰⁹ Varun Vira. 2011. *Op. Cit.* Hlm 24

¹¹⁰ Carissa Paramita. 2011. *Koalisi Lima Negara Memulai Serangan Udara di Libya*. Diakses melalui <http://www.dw.de/koalisi-lima-negara-memulai-serangan-udara-di-libya/a-6476524> [15 Maret 2015]

¹¹¹ VOA Indonesia. Com. 2011. *Pejuang NTC Libya Mendapat Perlawanan Sengit di Dua Kota Kubu Gaddafi*. Diakses melalui: <http://www.voaindonesia.com/content/pasukan-ntc-libya-akan-lakukan-serangan-baru-terhadap-kubu-gaddafi-130021598/98307.html> [12 Maret 2015]

¹¹² Liputan6.com. 2011. *NTC Gempur Kampung Halaman Khadafi*. Diakses melalui <http://news.liputan6.com/read/357005/ntc-gempur-kampung-halaman-khadafi> [12 Maret 2015]

tempat kelahiran Gaddafi merupakan basis terbesar pendukung Gaddafi. Apabila kota Sirte mampu dikuasai oleh pihak oposisi maka kekuatan pendukung Gaddafi semakin berkurang dan Gaddafi lebih mudah untuk ditaklukkan.

Ketimpangan kekuatan yang dimiliki oleh *National Transitional Council* (NTC) dan pemerintah Gaddafi mengundang respon negara-negara luar untuk ikut campur dalam penyelesaian krisis keamanan di Libya. Negara-negara besar yang dipelopori Amerika Serikat, Prancis dan Inggris berada di pihak NTC. Negara-negara tersebut bersama NTC melakukan upaya-upaya untuk melemahkan kekuatan Gaddafi. Ketiga negara tersebut secara *de facto* mengakui NTC sebagai pemerintahan yang sah mewakili rakyat Libya. Pengakuan tersebut diikuti oleh negara-negara lain diantaranya adalah Rusia, Uni Emirat Arab, Mesir, Australia, Jerman, Gambia, Italia, Yordania, Malta dan Spanyol.¹¹³

Konflik di Libya antara NTC dan pihak Gaddafi berlangsung cukup lama. Tidak adanya kesepakatan damai antara pemerintah Gaddafi dengan pihak oposisi sehingga konflik di Libya terus berlangsung. Pihak Gaddafi sulit ditaklukkan oleh pemberontak NTC. Konflik yang sedang berlangsung dalam kurun waktu dua bulan telah mengakibatkan banyak korban meninggal. Pihak Gaddafi tetap kukuh pada pendiriannya dan NTC juga tetap menginginkan Gaddafi meletakkan kekuasaanya. Kebuntuan tersebut membuat NTC secara formal meminta bantuan PBB. NTC meminta bantuan militer untuk intervensi konflik di Libya. Mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui permintaan NTC tersebut melalui aliansi negara-negara NATO untuk menciptakan keamanan di Libya.

Konflik yang semula hanya masalah internal antara pemerintah Gaddafi dengan rakyatnya yaitu para demonstran kini berkembang menjadi konflik senjata. Akibat tindakan represif pemerintah Gaddafi dan semakin memanasnya konflik antara dua pihak, telah mengundang masyarakat internasional untuk ikut campur atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi

¹¹³ B. Kunto Wibisono. 2011. *Gaddafi Remehkan Pengakuan Barat Terhadap Pemberontak Libya*. Diakses melalui: <http://www.antaraneews.com/berita/267547/gaddafi-remehkan-pengakuan-barat-terhadap-pemberontak-libya> [17 Maret 2015]

di Libya. Masyarakat internasional dalam hal ini direpresentasikan oleh PBB dan NATO.

3.3 Intervensi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) di Libya

Berlangsungnya konflik yang telah menelan banyak korban mendorong *National Transitional Council* (NTC) untuk meminta bantuan keamanan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Merespon permintaan NTC, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 tahun 2011 pada tanggal 17 Maret 2011.¹¹⁴ Resolusi DK PBB No. 1973 tahun 2011 tersebut kemudian menjadi dasar bagi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) untuk ikut campur mengatasi konflik yang terjadi di Libya. Dalam prakteknya NATO bersama kelompok oposisi (NTC) berperang melawan pasukan Gaddafi. Meskipun tujuan awalnya adalah pencegahan jatuhnya banyak korban jiwa namun pada kenyataannya, NATO menggunakan senjatanya untuk ikut berperang melawan pemerintahan Gaddafi.

3.3.1 Legalitas Intervensi NATO di Libya

Berpegang pada resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 tahun 2011 tentang kewenangan negara anggota PBB untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil, maka negara-negara anggota PBB diperbolehkan ikut campur atas krisis yang terjadi di Libya. Selanjutnya, negara-negara anggota PBB membentuk koalisi untuk melindungi warga sipil Libya dari serangan pasukan Muammar Gaddafi. Negara-negara yang tergabung dalam koalisi untuk melindungi warga sipil dalam konflik di Libya diantaranya adalah Amerika Serikat, Italia, Prancis, Inggris, dan Kanada. Sebelum resolusi DK PBB No. 1973 tahun 2011 diberlakukan, DK PBB telah mengeluarkan resolusi No. 1970 tahun 2011 pada 26 Februari 2011. Resolusi DK PBB No. 1970 merupakan perintah kepada negara – negara anggota PBB untuk melakukan investigasi terhadap kejahatan kemanusiaan pada konflik yang terjadi di Libya dan mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Gaddafi.

¹¹⁴L. Garland. 2012. *Libyan Civil War 2011*. White Word Publications. Delhi. Hlm. 70

Investigasi yang telah dilakukan oleh negara-negara koalisi anggota PBB seperti Amerika Serikat, Prancis dan Inggris menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran kemanusiaan di Libya yang dilakukan oleh pemerintahan Gaddafi. Pihak Gaddafi tidak segan menggunakan senjata untuk menghadapi aksi gerakan yang dilakukan oleh rakyat Libya. Akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak Gaddafi, banyak warga sipil yang menjadi korban.

Melihat krisis di Libya yang semakin parah, dimana banyaknya korban berjatuhan akibat tindakan represif pemerintahan Gaddafi maka Dewan Keamanan PBB melakukan sidang. Sidang oleh Dewan Keamanan PBB dilakukan guna mencari solusi untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi di Libya. Hasil dari sidang tersebut yaitu Resolusi DK PBB No. 1973 tahun 2011 disahkan oleh DK PBB pada tanggal 17 Maret 2011. Pengesahan resolusi tersebut dilakukan setelah mendapat dukungan dari 10 negara anggota DK PBB yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Portugal, Bosnia, Kolombia, Nigeria, Gabon dan Herzegovina. Sedangkan lima negara anggota DK PBB (Jerman, Rusia, Brazil, China dan India) bersikap abstain.¹¹⁵

Terbitnya resolusi DK PBB No. 1973 tahun 2011 menjadi dasar bagi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) untuk melakukan *Humanitarian Intervention* di Libya. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2011 pasukan NATO mulai beroperasi di Libya. Dalam operasinya pasukan koalisi NATO dibawah komando Letnan Jenderal Charles Bouchard (berasal dari Kanada) melakukan upaya-upaya untuk melemahkan pasukan Gaddafi di Libya. Posisi NATO di Libya berada bersama kelompok oposisi yang dimotori oleh *National Transitional Council* (NTC). Sesuai dengan resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB No. 1973 tahun 2011, NATO dalam misinya untuk melindungi warga Libya ikut berperang melawan pemerintahan Gaddafi. Upaya NATO untuk melemahkan kekuatan Gaddafi di Libya, dilakukan dengan tiga mekanisme yaitu embargo senjata, menerapkan zona larangan terbang (*no-fly zone*) dan perlindungan terhadap masyarakat sipil. .

¹¹⁵ *Ibid.* Hlm. 70

3.3.2 Operasi *Unified Protector* oleh NATO di Libya

Operasi *unified protector* yang dijalankan oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada bulan Maret 2011 merupakan misi intervensi militer NATO di Libya. Operasi tersebut dilakukan sesuai dengan perintah resolusi DK PBB No. 1973 tahun 2011 dengan menerapkan embargo senjata (dari jalur laut), zona larangan terbang (*no-fly zone*), dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.

¹¹⁶ Ada pun operasi militer yang dilakukan NATO mencakup:

1. Pemberlakuan embargo senjata

Embargo senjata di Libya dilaksanakan sejak tanggal 23 Maret 2011. Sesuai isi resolusi 1973 DK PBB memberi himbauan kepada negara-negaranya untuk menerapkan embargo senjata. Terutama himbauan tersebut berlaku bagi negara – negara *supplier* senjata Libya. Bentuk kesungguhan NATO dalam menjalankan tugasnya di Libya, NATO menjaga pos-pos yang dicurigai sebagai lalu lintas perdagangan. Pelabuhan dan bandara juga menjadi wilayah patroli pasukan NATO di Libya.

NATO dalam tugasnya mengawasi aktivitas pelayaran di kawasan wilayah perairan internasional Laut Mediterania. Kapal-kapal tempur NATO digunakan untuk mengawasi lalu lintas perairan internasional. Wilayah perairan seringkali dijadikan arus keluar masuknya perdagangan. Pada tanggal 24 Maret 2011 sepuluh anggota NATO (Kanada, Belgia, Inggris, Denmark, Yunani, Italia, Spanyol, Belanda, Turki, Amerika Serikat) mengirimkan sekitar 50 pesawat jet tempur dan beberapa kapal selam untuk menambah pengawasan embargo senjata Libya.¹¹⁷ Penempatan pasukan NATO di kawasan Laut Mediterania untuk mencegah masuknya senjata atau kapal-kapal yang mencurigakan dari luar ke wilayah Libya.

2. Menerapkan zona larangan terbang (*no-fly zone*)

Penerapan zona larangan terbang oleh DK PBB, mendapat dukungan dari Liga Arab. Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan di Kairo, Mesir. Pertemuan tersebut membahas dukungan atas penerapan

¹¹⁶ International Center. 2011. *Op. Cit.* Hlm 27

¹¹⁷ Claire Taylor. 2011. *Military Operation in Libya*. House of Commons Library. Hlm 10

zona larangan terbang di Libya yang sedang direncanakan oleh DK PBB. Setelah diputuskan bahwa Liga Arab mendukung rencana penerapan zona larangan terbang, Amr Moussa selaku Sekretaris Jendral Liga Arab mendesak DK PBB untuk merumuskan keputusan zona larangan terbang di Libya.¹¹⁸

DK PBB melarang segala aktivitas penerbangan di wilayah udara Libya dalam rangka melindungi warga sipil Libya. Pemberlakuan zona larangan terbang (*no-fly zone*) dimulai pada tanggal 24 Maret 2011. NATO dalam operasinya menggunakan teknologi-teknologi canggih seperti *Airborne Early Warning and Control Aircraft* (AWACS) alat identifikasi kapal dan memonitoring aktivitas udara di Libya. NATO berhak menghentikan pesawat yang melintas di udara Libya dengan segala cara. DK PBB memberikan kewenangan dengan memperbolehkan NATO menggunakan cara kekerasan apabila dalam keadaan mendesak.

3. Perlindungan terhadap masyarakat sipil Libya

31 Maret 2011 NATO mulai menghimpun informasi dan mengawasi gerakan-gerakan yang mengancam masyarakat sipil dan wilayah pemukiman di Libya. Tindakan berupa ancaman yang dimaksud adalah penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Tindakan yang mengancam merupakan tindakan yang sering dipraktikkan oleh pemerintahan Gaddafi terhadap pemberontak Libya.¹¹⁹ Perlakuan sewenang-wenang pemerintahan Gaddafi terhadap para demonstran mendapat kecaman dari negara-negara lain. Khususnya negara –negara aliansi NATO yang sedang menjalankan misi *Humanitarian Intervention* di Libya.

Sejak diberlakukannya ketentuan operasi *unified protector*, militer Prancis, Inggris dan Amerika Serikat dibawah komando NATO melakukan penyerangan terhadap pasukan pemerintahan Gaddafi. Serangan yang dilakukan negara-negara aliansi NATO melalui udara telah menghancurkan sebagian besar

¹¹⁸ Bettina Marx dan Christa Saloh. 2011. *Liga Arab Dukung Zona Larangan Terbang*. Diakses dari <http://www.dw.de/liga-arab-dukung-zona-larangan-terbang/a-6468978> [2 April 2015]

¹¹⁹ *Ibid.* Hlm 12

pangkalan militer Gaddafi. Operasi *unified protector* militer NATO yang dipimpin oleh jenderal Bouchard, menghancurkan radar anti penerbangan yang dimiliki Libya, kendaraan tempur dan fasilitas-fasilitas perang angkatan perang Libya.

Keberhasilan penghancuran fasilitas – fasilitas perang yang dimiliki pihak Gaddafi di Libya dan didukung oleh kekompakan negara-negara aliansi NATO untuk melakukan pembebasan Libya dari rezim Gaddafi membuat kekuatan Gaddafi di Libya semakin lemah. Kekompakan negara-negara aliansi NATO tersebut ditunjukkan dengan saling melengkapi kekurangan pasukan dan persenjataan NATO. Pada tanggal 1 April 2011 melalui persetujuan parlemen, Swedia mengirim 8 jet Gripen dan sebuah pesawat Transport C-130 untuk membantu operasi *unified protector* di Libya. Pada tanggal 4 April 2011 di ikuti dengan pengiriman 4 pesawat tornado GR-4 oleh Inggris. Selanjutnya tanggal 15 April 2011 tiga pemimpin negara Amerika Serikat, Prancis dan Inggris mengeluarkan surat bersama hasil perundingan membahas situasi di Libya. Perundingan tentang situasi di Libya dilakukan oleh Barack Obama, Nicolas Sarkozy dan David Cameron. Isi surat bersama tersebut menyatakan:

*Our duty and our mandate under U.N. Security Council Resolution 1973 is to protect civilians and we are doing that. It is not to remove Gaddafi by force. But it is impossible to imagine a future for Libya with Gaddafi in power.*¹²⁰

Menanggapi kekerasan yang dilakukan oleh pihak Gaddafi terhadap warga sipil di Libya maka negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis dan Inggris melalui NATO melakukan intervensi di Libya. Selain ketiga negara tersebut Swedia, Italia, Spanyol dan negara anggota NATO yang lain juga ikut berperang melawan pasukan Gaddafi.

Keterlibatan negara-negara barat dalam operasi *unified protector* yang dilakukan oleh NATO tujuan awalnya adalah untuk melindungi warga sipil dari kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Gaddafi. Namun pada kenyataannya operasi yang dilakukan oleh NATO memperuncing konflik yang terjadi antara

¹²⁰ The New York Times. 2011. *Libya's Pathway to Peace*. Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2011/04/15/opinion/15iht-edlibya15.html> [27 Maret 2015]

pihak yang pro Gaddafi dengan pihak yang kontra terhadap Gaddafi. Sehingga akibat dari konflik tersebut banyak korban jiwa yang tewas. Dalam akhir peristiwa penggulingan kekuasaan Gaddafi di Libya, juga menewaskan Gaddafi yang telah memimpin Libya selama 42 tahun. Gaddafi tewas pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 di kota Sirte. Gaddafi tewas ketika rombongannya yang menuju daerah bagian barat Libya diserang oleh pesawat tempur NATO. Serangan tersebut dapat dihindari oleh Gaddafi. Namun dalam upayanya melarikan diri, Gaddafi tertangkap oleh pemberontak Libya dan kemudian dibunuh.¹²¹

Menurut Sekjen NATO saat itu, Anders Fogh Rasmussen, setelah tewasnya Gaddafi dan berdasarkan veto dari DK PBB maka intervensi NATO di Libya ditetapkan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2011. Namun tidak menutup kemungkinan kembalinya campur tangan NATO di Libya apabila keberadaan NATO di Libya masih dibutuhkan oleh pemerintah yang baru. Misalnya untuk mereformasi aparat keamanan dan pertahanan Libya.¹²²

Terbunuhnya Gaddafi oleh serangan senjata yang dilakukan pasukan NATO dan NTC menandakan bahwa rezim otoriter di Libya telah berakhir. Berakhirnya rezim otoriter merupakan pintu awal bagi perjalanan transisi demokrasi di Libya. Selanjutnya, NTC sebagai pemegang otoritas pemerintahan yang sah memiliki tugas mewujudkan demokrasi di Libya. Sebagai bentuk upaya perwujudan demokrasi di Libya, NTC melakukan liberalisasi kehidupan politik dengan menyelenggarakan pemilihan umum parlemen.

¹²¹ Elin Yunita Kristanti. 2011. *Detik-Detik Tewasnya Muammar Khadafi*. Diakses melalui <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/257571-detik-detik-tewasnya-moammar-khadafi> [28 Maret 2015]

¹²² Christa Saloh. 2011. *Sekjen NATO Nilai Positif Misi di Libya*. Diakses melalui <http://www.dw.com/id/sekjen-nato-nilai-positif-misi-di-libya/a-15496452> [28 Maret 2015]

BAB 5. KESIMPULAN

Proses transisi demokrasi di Libya pada tahun 2011 terjadi melalui dua jalur yaitu proses *replacement* dan intervensi. Proses *replacement* ditandai dengan terjadinya pemberontakan terhadap pemerintahan Muammar Gaddafi oleh kelompok oposisi yang direpresentasikan oleh *National Transitional Council* (NTC). Proses intervensi ditandai oleh masuknya *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada bulan Maret 2011 untuk melawan pasukan militer Gaddafi. Aksi perlawanan tersebut berujung pada terbunuhnya Gaddafi oleh revolusi rakyat pada bulan Oktober 2011.

Terbunuhnya Gaddafi oleh revolusi rakyat Libya menandakan bahwa rezim otoriter di Libya telah berakhir. Demokratisasi di Libya berlanjut pada proses tahapan-tahapan transisi demokrasi. Tahapan yang harus dilalui adalah transisi, liberalisasi, instalasi dan konsolidasi demokrasi. Proses tahapan transisi terjadi di dalam masa peralihan pemerintahan yang dimulai sejak terbentuknya NTC. Tahapan liberalisasi diwujudkan dengan pembebasan tahanan politik, dibukanya kebebasan pers dan dilaksanakannya pemilihan umum parlemen pada tahun 2012 dan 2014. Proses instalasi ditandai dengan pencabutan UU Libya No. 71 tahun 1972 tentang pelarangan berdirinya organisasi dan partai politik, diganti dengan UU Libya No. 29 tahun 2012 yang berarti memperbolehkan berdirinya partai politik di Libya. Tahapan selanjutnya yaitu konsolidasi, dimana tahapan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kegagalan rekonsiliasi nasional di Libya.

Namun dengan dilaluinya tahapan-tahapan transisi demokrasi sejak tahun 2011 sampai 2014 menggambarkan bahwa kondisi Libya relatif lebih demokratis dibanding pada era pemerintahan Gaddafi. Libya pada era Gaddafi tidak pernah mengadakan pemilihan umum dan pemerintahannya cenderung tertutup. Sedangkan di era pasca Gaddafi pemerintahan Libya lebih terbuka dengan memberi kebebasan pada pers untuk memberitakan kondisi di dalam pemerintahan Libya. Selain itu pemerintah juga memberi kebebasan untuk berdirinya partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baydhawi, Zakiyuddin. 2000. *Menapak Jalan Revolusi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- D.H., Agung. 2011. *Khadafi Anjing Gila dari Sahara*. Yogyakarta: Narasi.
- Dahl, Robert A. 1984. *Polyarchy, Pluralism, and Scale*. Scandinavian Political Studies. Yale University. Vol 7. Hlm. 4
- Fisher, W.B. 1993. *Libya: The Middle East and North Africa*. London: Europe Plication Limited.
- Garland, L. 2012. *Libyan Civil War 2011*. Delhi: White Word Publications.
- Hadi, Sutrisno. 1996. *Method Research Jilid I*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Jessup, John E. 1998. *An Encyclopedic Dictionary of Conflict and Conflict Resolution 1945-1996*. Greenwood: Rehabilitation Institute of Chicago.
- Mas' oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Mintarja, Endang. 2006. *Politik Berbasis Agama Perlawanan Muammar Qadhafi Terhadap Kapitalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O'Donnell, Guillermo dan Schmitter, Phillipe C. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Jakarta: LP3ES.
- Romli, Asep Syamsul M.. 2000. *Demonolgi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Shaked, Haim and Dishon, Daniel. 1987. *Middle East Contemporary Survey*. Colorado: Westview Press. Vol. 8.

Soyomukti, Nurani dan Iqbal, Muhammad. 2011. *Ben Ali, Mubarak, Khadafi Pergolakan Politik Jazirah Arab Abad 21*. Bandung: Medium

Tamburaka, Apriadi. 2011. *Revolusi Timur Tengah. Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara – Negara Timur Tengah*. Jakarta: Narasi.

The Liang Gie. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*. Yogyakarta : UGM Press

Vira, Varun., Cordesman, Anthony H., and Burke, A. 2011. *The Libya Uprising: An Uncertain Trajectory*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Surat Kabar

Kuncahyono, Trias. 2011. *Membaca Peta Libya*. Kompas. Terbit tanggal 24 Februari 2011.

Internet

Abd Rahman, Musthafa. 2012. *Mantan Diplomat Jadi Perdana Menteri Baru*. Diakses melalui <http://bola.kompas.com/read/2012/10/16/04354487/Mantan.Diplomat.Jadi.Perdana.Menteri.Baru> (25 September 2015)

Adiwiyata, Yuldi. 2011. *Libya Membara*. Diakses melalui <http://www.forumkeadilan.com/focus.php?tid=93> (28 September 2014)

Akbar, Aulia. 2012. *Mengenal Libya Kuno*. Diakses melalui <http://news.okezone.com/read/2012/08/17/412/679226/mengenal-libya-kuno> (7 September 2015)

Al Majdi, Muhib. 2011. *NTC Pilih Abdurrahim El-Keib Sebagai Kepala Negara Libya*. Diakses dari <http://www.arahmah.com/read/2011/11/01/16123-ntc-pilih-abdurrahim-el-keib-sebagai-kepala-negara-libya.html> (15 Mei 2015)

Ali, Khadija. 2013. *Freedom of Expression in Post-Revolution Libya*. Diakses melalui <http://fikraforum.org/?p=3296#.VXO4GY4rmXg> (1 Juni 2015)

Aljazeera.com. 2012. *Libya's Political Parties. A Brief Look at Some of The Main Political Forces in The July 7 Vote for The General Congress*. Diakses melalui <http://www.aljazeera.com/news/africa/2012/06/2012626224516206109.html> (3 Juni 2015)

- Anderson, Scott. 2003. *Libya's Colonel Muammar Gaddafi*. Diakses melalui <http://www.orwelltoday.com/libgaddafitent.shtml> (7 September 2015)
- Amnesty International. 2010. *Libya: Submission to the UN Universal Periodic Review: Ninth session of the UPR Working Group of the Human Rights Council*. Diakses melalui <http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE19/005/2010/en> (20 September 2014)
- Antara. 2011. *Petinggi Dinas Intelejen Libya Bergabung dengan Pemberontak*. Diakses melalui <http://www.antaraneews.com/berita/273217/> (5 Oktober 2014)
- BBC. 2011a. *Ratusan Orang Demonstran Anti Pemerintah Bentrok dengan Polisi dan Pendukung Pemerintah di Kota Benghazi Libya*. Diakses melalui http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110217_libya.shtml (11 Agustus 2014)
- . 2011b. *Libya: Pro-Gaddafi forces attack rebel-held Ras Lanuf*. Diakses melalui <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12670482> (30 September 2014)
- Beritasatu.com. 2012. *Hasil Sementara Pemilu Libya, Koalisi 60 Partai Memimpin*. Diakses melalui <http://www.beritasatu.com/dunia/59270-hasil-sembentara-pemilu-libya-koalisi-60-partai-memimpin.html> (1 Juni 2015)
- Calgary, Alberta. 2011. *FDA: Global Electoral Fairness Audit Report*. Diakses melalui <http://www.slideshare.net/FDAAdvancement/libya2011-fda-electoral-fairness-audit> (6 September 2014)
- Choirul. 2013. *Profil Ali Zeidan, PM Libya Dibebaskan Penculik*. Diakses melalui <http://dunia.tempo.co/read/news/2013/10/11/115521072/profil-ali-zeidan-pm-libya-dibebaskan-penculik> (25 September 2015)
- CIA. 2011. *The World Factbook*. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html> (7 September 2015)
- . 2013. *The World Factbook: Libya*. Diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html> (2 Januari 2015)

- Country-data.com. 1987. *Libya Religious Opposition*. Diakses melalui <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-8219.html> (20 September 2015)
- Country data.com. 2010. *Libya: Opposition to Qadhafi*. Diakses melalui <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-8216.html> (6 September 2014)
- Country-data.com. 2011. *Libya Exiled Opposition*. Diakses melalui <http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-8220.html> (20 September 2015)
- Dupree, Louis. 1958. *The Non-Arab Ethnic Group of Libya*. Middle East Institute. Washington. Vol.12 Hlm. 33 Diakses melalui http://www.jstor.org/stable/4322977?seq=1#page_scan_tab_contents (7 September 2015)
- El Mallakh, Ragaei. 1969. *The Economic of Rapid Growth: Libya*. Middle East Journal. Middle East Institute Vol. 23 No.3 Hlm 308. Diakses melalui http://www.jstor.org/stable/4324474?seq=1#page_scan_tab_contents (8 September 2015)
- Eljahmi, Mohamed. 2009. *Don't Let My Brother's Death Be In Vain*. Diakses melalui <http://www.forbes.com/2009/06/15/fathi-eljahmi-libya-opinions-contributors-human-rights.html> (24 Februari 2015)
- Emadi, Hafzullah. 2010. *Libya: The Road to Regime Change*. Diakses melalui <http://www.worlddialogue.org/content.php?id=541> (7 September 2015)
- Farid, Yuniman. 2011. *Revolusi Akan Kembali Pecah Di Libya?*. Diakses melalui <http://www.dw.de/revolusi-kembali-akan-pecah-di-libya/a-15600389> (25 Mei 2015)
- Foerster, Christa. 2011. *PBB Akui Dewan Transisi Libya*. Diakses dari <http://www.dw.de/pbb-akui-dewan-transisi-libya/a-15394433> (19 Mei 2015)
- France24. 2011. *Who's who in Libya's National Transitional Council*. Diakses melalui <http://www.france24.com/en/20110902-whos-who-libyas-national-transitional-council/> (30 September 2014)
- Gardner, Frank. 2011. *Siapa Penyokong Rezim Gaddafi?*. Diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/03/110304_penyangga_gaddafi.shtml (7 September 2015)

- Hellfeld, Matthias V. 2011. *Libya: Chronology of a Revolt Against a Dictator*. Diakses melalui <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15335165,00.html> (28 September 2014)
- IMF. 2010. *Middle East and North Africa (developing only)*. Diakses melalui <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2010&scsm=1&ssd=1sort=country&ds=.&br=1&c=672&s=NGDP%2CNGDPDPC%2CPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=46&pr.y=14> (7 September 2015)
- International Center. 2011. *Libya: An Uncertain Future – Report on a Fact Finding Mission to Assess Both Sides of the Libyan Conflict*. Diakses dari <http://www.iran-bulletin.org/Middle%20east%20society/LibyaReport201105.pdf> (27 September 2014)
- Jackson, Lucas. 2011. *Sekjen PBB: Kematian Qadhafi, Saatnya Libya Rekonsiliasi*. Diakses melalui <http://dunia.tempo.co/read/news/2011/10/21/119362540/Sekjen-PBB-Kematian-Qadhafi-Saatnya-Libya-Rekonsiliasi> (9 Juni 2015)
- KabarNet. 2011. *Pemerintahan Baru Libya Kembali pada Syariah Islam*. Diakses melalui <http://kabarnet.in/2011/10/24/pemerintahan-baru-libya-menuju-syariah-islam/> (3 Oktober 2014)
- Klimes, Michael. 2011. *Post-Gaddafi Era Libya's Diverse Islamist Seek Political Role*. Diakses melalui <http://www.quilliamfoundation.org/press/global-arab-network-article-post-gaddafi-era-libyas-diverse-islamists-seek-political-role/> (20 September 2015)
- Kristanti, Elin Yunita. 2011. *Detik-Detik Tewasnya Muammar Khadafi*. Diakses melalui <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/257571-detik-detik-tewasnya-moammar-khadafi> (28 Maret 2015)
- Lieberman, Dan. 2010. *Muammar Al Gaddafi Meets His Own Rebels*. Di akses dari <http://www.opednews.com/articles/Muammar-Al-Gaddafi-Meets-h-by-Dan-Lieberman-110314-522.html> (20 Februari 2015)
- Liputan6.com. 2011. *NTC Gempur Kampung Halaman Khadafi*. Diakses melalui <http://news.liputan6.com/read/357005/ntc-gempur-kampung-halaman-khadafi> (12 Maret 2015)
- M, Siraaj. 2012. *Revolusi Ke Dua Di Libya, Kaum Muslimin Turun Ke Jalan-Jalan Untuk Menuntut Penerapan Syari'at Islam*. Diakses melalui <http://www.arahmah.com/read/2012/06/11/20872-revolusi-kedua-di->

libya-kaum-muslimin-turun-ke-jalan-jalan-untuk-menuntut-penerapan-syariat-islam.html (15 September 2015)

- Mapsofworld.com. 2013. *Libya Map*. Diakses melalui <http://www.mapsofworld.com/libya/> (2 Januari 2015)
- Maryati .2014. *Mahkamah Agung Libya Tolak Akui Parlemen Terpilih*. Diakses melalui <http://www.antaraneews.com/berita/463023/mahkamah-agung-libya-tolak-akui-parlemen-terpilih> (25 September 2015)
- Marx, Bettina dan Saloh, Christa. 2011. *Liga Arab Dukung Zona Larangan Terbang*. Diakses melalui <http://www.dw.de/liga-arab-dukung-zona-larangan-terbang/a-6468978> (2 April 2015)
- Mathaba.net. 2011. *The Green Book Part One*. Diakses melalui <http://www.mathaba.net/gci/theory/gb1.htm#instrument> (12 September 2015)
- Muasher, Marwan. 2012. *Libyan Prime Minister Abdel-Rahim El Keib*. Diakses melalui <http://carnegieendowment.org/2012/03/09/libyan-prime-minister-abdel-rahim-el-keib> (25 Mei 2015)
- Nugraha, Pepih. 2011. *Khadafy Masih Simpan Senjata Kimia*. Diakses melalui <http://internasional.kompas.com/read/2011/08/24/0937278/Khadafy.Masih.Simpan.Senjata.Kimia>. [8 Februari 2016]
- Paramita, Carissa. 2011. *Koalisi Lima Negara Memulai Serangan Udara di Libya*. Diakses melalui <http://www.dw.de/koalisi-lima-negara-memulai-serangan-udara-di-libya/a-6476524> (15 Maret 2015)
- Permadi, Renata. 2011. *Dunia Kutuk Rejim Khadafi*. Diakses melalui <http://www.dw.de/dunia-kutuk-rejim-khadafi/a-14870739> (23 Februari 2015)
- Piper, Elizabeth. 2011. *Factbox: Libya's Tribal, Culture Divisions*. Diakses melalui <http://www.reuters.com/article/2011/08/25/us-libya-tribes-idUSTRE77O43R20110825> (8 September 2015)
- Putri, Indrani. 2011. *ASEAN Dukung Rekonsiliasi Libya*. Diakses melalui <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/244669/asean-dukung-rekonsiliasi-libya> [5 Juni 2015]
- R.A Kawilarang, Renne. 2011a. *Harta di Balik Jubah Sang Kolonel*. Diakses melalui <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/207837-harta-di-balik-jubah-sang-kolonel-> (8 September 2015)

- R. A. Kawilarang, Renne. 2011b. *Kegilaan Kolonel Khadafi*. Diakses melalui <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/207834-kegilaan-kolonel-khadafi> (13 September 2015)
- R. A. Kawilarang, Renne. 2012. *19-12-2003: Libya Lucuti Senjata Pemusnah Massal*. Diakses melalui <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/376016-19-12-2003--libya-lucuti-senjata-pemusnah-massal> (8 Februari 2016)
- R.H., Priyambodo. 2008. *Rice Jadi Tuan Rumah Kunjungan Bersejarah Menlu Libya*. Diakses melalui <http://www.antaranews.com/berita/88947/rice-jadi-tuan-rumah-kunjungan-bersejarah-menlu-libya> [8 Februari 2016]
- Ratna, Heppy. 2014. *Pemilu Libya Tetap Diselenggarakan 25 Juni*. Diakses melalui <http://www.antaranews.com/berita/436504/pemilu-libya-tetap-diselenggarakan-25-juni> (5 Juni 2015)
- Refworld. 2001. *Libya: Libyan Liberation Organization (LLO)*. Diakses melalui <http://www.refworld.org/docid/3df4be5f18.html> (20 September 2015)
- Refworld. 2014. *Libya: Situation of The Tebu Ethnic Group And Their Advocates Includig Treatment by Society And Authorities; Relationship With Other Ethnic Groups*. Diakses melalui <http://www.refworld.org/docid/54ca11984.html> (8 September 2015)
- Rita, Maria. 2012. *Libya Gelar Pemilihan Parlemen Pertama*. Diakses melalui <http://dunia.tempo.co/read/news/2012/07/06/115415144/Libya-Gelar-Pemilihan-Parlemen-Pertama> (1 Juni 2015)
- S, Magdalena. 2008. *Profil: Muammar Gaddafi, "Singa Tua" dari Libya*. Diakses melalui <http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/profil-muammar-gaddafi-quot-singa-tua-quot-dari-libya.htm#.VUGXc44rmXg> (2 Januari 2015)
- Saloh, Christa. 2011. *Sekjen NATO Nilai Positif Misi di Libya*. Diakses melalui <http://www.dw.com/id/sekjen-nato-nilai-positif-misi-di-libya/a-15496452> (28 Maret 2015)
- Saptohutomo, Aryo Putranto. 2012. *Tindakan Kekerasan Warnai Pemilu Libya*. Diakses melalui <http://www.merdeka.com/dunia/tindak-kekerasan-warnai-pemilu-libya.html> (3 Juni 2015)
- Security Council. 2011a. *Security Council Approves 'No-fly Zone' over Libya*. Diakses melalui

- <http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm> (30 September 2014)
- Security Council. 2011b. *Africa Libya*. Diakses melalui http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2011-10/lookup_c_glKWLeMTIsG_b_7751797.php (10 September 2015)
- Simanjuntak, Laurecius. 2011. *Ini Dia Anggota Kabinet Pemerintahan Transisi Baru Libya*. Diakses dari <http://news.detik.com/read/2011/11/23/050932/1773352/1148/4/ini-dia-anggota-kabinet-pemerintahan-transisi-baru-libya> (17 Mei 2015)
- Steffi, Peter. 2012. *Kongres Nasional 'Pecat' PM Libya*. Diakses Melalui <http://www.dw.com/id/kongres-nasional-pecat-pm-libya/a-16291325> (5 Juni 2015)
- Syelvia, Yesi. 2012. *Kelompok Liberal Kuasai Pemilu Libya*. Diakses melalui <http://international.sindonews.com/read/659345/43/kelompok-liberal-kuasai-pemilu-libya-1342583666> (3 Juni 2015)
- Temehu.com. 2006. *Libya Arab Jamahiriya Constitution 1969*. Diakses melalui <https://www.temehu.com/NTC/libyan-arab-jamahiriya-constitution-1969.pdf> (12 September 2015)
- _____. 2011. *Formation of NTC*. Diakses melalui <https://www.temehu.com/ntc.htm> (17 Maret 2015)
- _____. 2012. *Introduction To Political Parties In Libya*. Diakses melalui <https://www.temehu.com/political-parties.htm> (1 Juni 2015)
- The Associated Press. 2012. *The Major Parties in Libya's First Elections Since Arab Spring Protests Toppled Gadhafi*. Diakses melalui <http://www.haaretz.com/news/middle-east/the-major-parties-in-libya-s-first-elections-since-arab-spring-protests-toppled-gadhafi-1.449352> (3 Juni 2015)
- The Guardian.com. 2011. *A vision of a democratic Libya*. Diakses melalui <http://www.theguardian.com/commentisfree/2011/mar/29/vision-democratic-libya-interim-national-council> (8 Juni 2015)
- The Library of Congress. 2011. *Libya Opposition to Qadhafi*. Diakses melalui <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field%28DOCid+ly0110%29> (20 September 2015)

- The New York Times. 2011. *Libya's Pathway to Peace*. Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2011/04/15/opinion/15iht-edlibya15.html> (27 Maret 2015)
- Tim Redaksi. 2011. *Tak "Ternoda" Khadafy, Dosen itu Pimpin Libya*. Diakses melalui <http://internasional.kompas.com/read/2011/11/05/11125450/Tak.Ternoda.Khadafy.Dosen.Itu.Pimpin.Libya> (5 November 2014)
- Tim Redaksi. 2011b. *Libya Tanpa Ekspatriat Lumpuh*. Diakses melalui <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/02/27/libya-tanpa-ekspatriat-lumpuh/> (29 Desember 2014)
- Tim Redaksi. 2012. *Warga Tripoli dan Benghazi Serahkan Senjata*. Diakses melalui <http://internasional.kompas.com/read/2012/10/01/02122199/Warga.Tripoli.dan.Benghazi.Serahkan.Senjata> (5 Juni 2015)
- Tim Redaksi. 2015. *Khadafy Lenyap, Masalah Dinasti Muncul*. Diakses melalui <http://internasional.kompas.com/read/2011/10/28/04425556/khadafy.lenyap.masalah.dinasti.muncul> (7 September 2015)
- Tim Redaksi. 2014. *Libya Digoyang Pemberontakan Anti-Islamis*. Diakses melalui <http://www.dw.com/id/libya-digoyang-pemberontakan-anti-islam/a-17645516> (8 Juni 2015)
- Tim Redaksi. 2014. *Perdana Menteri Libya Dibebaskan*. Diakses melalui <http://www.dw.de/perdana-menteri-libya-dibebaskan/a-17149256> (8 Juni 2015)
- United Nations. 2010. *Libya Constitution 1969*. Diakses melalui <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan004643.pdf> (7 September 2015)
- Valiente, Alexandra. 2011. *Celebrating The Great Achievements of Muammar Gaddafi*. Diakses melalui <https://libyadiary.wordpress.com/2011/11/09/celebrating-the-great-achievements-of-muammar-gaddafi/> (12 September 2015)
- Vandewalle, Dirk. 2011. *Libya Since 1969*. Diakses melalui <http://www.thehistoryreader.com/contemporary-history/libya-since-1969/> (7 September 2015)
- VOA Indonesia. 2011. *Pejuang NTC Libya Mendapat Perlawanan Sengit di Dua Kota Kubu Gaddafi*. Diakses melalui <http://www.voaindonesia.com/content/pasukan-ntc-libya-akan->

lakukan-serangan-baru-terhadap-kubu-gaddafi-130021598/98307.html
(12 Maret 2015)

VOA Indonesia. 2014. Libya Gelar Pemilu Parlemen. Diakses melalui
<http://m.voaindonesia.com/a/libya-gelar-pemilu-parlemen-1944465.html> (5 Juni 2015)

VOA-Islam. 2013. *Mujahidin Dan Pasukan Khusus Libya Bentrok di Benghazi, 9 Tewas*. Diakses melalui <http://www.voa-islam.com/read/international-jihad/2013/11/25/27781/mujahidin-dan-pasukan-khusus-libya-bentrok-di-benghazi-9-tewas> (15 September 2015)

Wibisono, B. Kunto. 2011. *Gaddafi Remehkan Pengakuan Barat Terhadap Pemberontak Libya*. Diakses melalui
<http://www.antarane.ws.com/berita/267547/gaddafi-remehkan-pengakuan-barat-terhadap-pemberontak-libya> (17 Maret 2015)